

**ANALISIS PENURUNAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
POLITIK
(STUDI ATAS PARTAI DEMOKRAT DALAM PEMILU LEGISLATIF
DPRD KOTA SEMARANG TAHUN 2019)**

**Skripsi
Program Sarjana (S-1)
Jurusan Ilmu Politik**



**Oleh :
FARISHI ADITYASANDI
1906016048**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) Eksemplar

Hal : Pengajuan Naskah Skripsi

Kepada YTH.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, saya menyatakan bahwa skripsi dari saudara :

Nama : Farishi Adityasandi

NIM : 1906016048

Jurusan: Ilmu Politik

Judul Skripsi : Analisis Penurunan Perolehan Suara Partai Politik (Studi Atas
Partai Demokrat Dalam Pemilu Legislatif DPRD Kota Semarang
Tahun 2019)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar dapat segera diujikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 20 Maret 2023
Pembimbing,



Solkhah Mufrikah, M.Si
NIP. 198505102016012901

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS PENURUNAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
Studi Atas Partai Demokrat Dalam Pemilu Legislatif DPRD Kota Semarang Tahun
2019

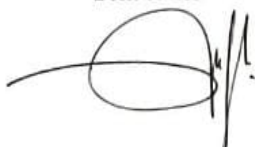
Disusun oleh

Farishi Adityasandi

1906016048

Telah dipertahankan di depan majelis penguji sidang skripsi pada tanggal 5 April 2023
dan dinyatakan lulus


Ketua
Dr. Tholkhatul Khoir, M. Ag
NIP. 197701202005011005

Sekretaris

Solkhah Mufrikha, M.Si
NIP. 198505102016012901

Penguji I

Rofiq, M.Si
NIP. 197303052016011901

Pembimbing

Solkhah Mufrika M.Si
NIP. 198505102016012901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Farishi Adityasandi meyakini bahwa skripsi saya dengan judul “Analisis Penurunan Perolehan Suara Partai Politik : Studi Atas Partai Demokrat Dalam Pemilu Legislatif DPRD Kota Semarang Tahun 2019” merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya tercantum di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 28 Maret 2023
Yang Menyatakan



Farishi Adityasandi
NIM 1906016048

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur kita panjatkan terhadap kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunianya, peneliti berhasil menyelesaikan pembuatan skripsi ini dengan judul “Analisis Penurunan Perolehan Suara Partai Politik: Studi Atas Partai Demokrat Dalam Pemilu Legislatif DPRD Kota Semarang Tahun 2019”. Sholawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yang telah membawa kita dari zaman *Jahiliyyah* kedalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini, yakni Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini diajukan guna untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan S1 dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (Politik) di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwasannya dalam pembuatan dan penyusunan skripsi ini masih banyak ditemukan kekurangan, kesalahan serta masih jauh dari kata sempurna, hal itu dikarenakan kemampuan yang dimiliki peneliti kurang mumpuni dan terbatas. Penghargaan atas pencapaian ini peneliti persembahkan terima kasih kepada kedua orang tua yakni kepada Ayahanda Salamuddin ST. dan Ibunda Mahdalena yang telah memberikan segenap cinta dan kasih sayangnya serta dukungan dan perhatian kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga tak lupa diucapkan kepada saudara-saudara saya Afdika Rinaldi, Andrie Vishkar dan Adik perempuan tercinta Nadine Dzulaikha yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti.

Peneliti menyadari bahwa pembuatan skripsi ini tidak mungkin akan terlaksana apabila tidak ada dukungan dan bantuan dari beberapa pihak terkait, melalui kesempatan ini izinkan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum yang telah memberikan banyak ilmu, arahan, serta nasehat selama penulis menimba ilmu pada program studi Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang.
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang, Bapak Drs. Nur Syamsudin, M.A yang telah memberikan dukungan dan berbagai ilmu kepada penulis dalam perkuliahan.

4. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang, Bapak Muhammad Mahsun, M.A yang telah memberikan dukungan dan berbagai ilmu kepada penulis dalam perkuliahan.
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Solkhah Mufrikha, M.Si yang telah memberikan masukan dan saran serta tata cara penyusunan skripsi dengan sabar dan lemah lembut dalam penyusunan penelitian ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu yang berlimpah sehingga penulis mampu mengimplementasikan ilmu yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap jajaran tenaga pendidik dan civitas akademika Fisip UIN Walisongo Semarang yang telah membantu penulis dalam memenuhi segala kebutuhan administratif dalam penyusunan skripsi ini.
8. Dewan Eksekutif Partai Demokrat Jawa Tengah, Bapak Ali Mas'adi beserta seluruh keluarga DPD Partai Demokrat Jawa Tengah yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ketua DPC Partai Demokrat kota Semarang, Bapak Wahyoe Winarto beserta seluruh keluarga DPC Partai Demokrat kota Semarang yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan penulis, terkhusus Kasisha Zaharani, Cecep Nugroho, dan Galih Rahmat Dani atas support dan motivasi serta bantuan kepada penulis, semoga selalu diberikan rahmat yang berlimpah dan selalu diberikan kebahagiaan.
11. Teman-teman mahasiswa Ilmu Politik, terkhusus Ilmu Politik B 2019 yang telah memberikan pengalaman yang berharga bagi penulis, semoga masing-masing dari kita menjadi orang yang sukses dunia akhirat.
12. Teman-teman penghuni kontrakan Taman Beringin Elok II blok F.16, Fauzaan Arif Sumanto, Muhamad Fikri, dan Rezka Nur Satyo beserta tamu-tamu yang sering berkunjung.
13. Keluarga besar Walisongo Sport Club (WSC) UIN Walisongo Semarang.
14. Keluarga besar Fisip Sport Club (FSC) UIN Walisongo Semarang, terkhusus pengurus Fisip Sport Club (FSC) 2022.
15. Rekan-rekan KKN Mandiri Misi Khusus Kelompok 05 Dusun Ngabean, Tanjungsari, Adinda Widya Rini, Aisyah Chofifawati, Ardianto Rudi Hartono, Audrey Clara Priisilla, Ganung Ringganing Putra, Jamal Hajj Wicaksono, Jihad A'la

Ulya Adhim, Krisna Wahyu, Rizqi Fauzan, Roro Budi Suciati, Saharawati, Sukron Faiz Irsyad, Vera Azizah Aulia, dan Zhusna Nisha.

16. Teman-teman penghuni grup whatsapp, Motivasi Hidup, Remaja Masjid Al-Maskun, Ilmu Hukum B, Kriik, Social Two, dan Timnas Fisip.
17. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Peneliti berharap segala bentuk motivasi, dorongan dan dukungan yang diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan oleh Allah SWT. Peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki dan melengkapi segala kekurangan dalam penyusunan skripsi untuk kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Akhir kata semoga skripsi ini memiliki banyak manfaat bagi peneliti sendiri dan orang-orang yang membacanya serta bagi perkembangan Ilmu Politik dimasa yang akan datang.

Semarang, 28 Maret 2023
Yang Menyatakan



Farishi Adityasandi
NIM 1906016048

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan do'a dan rasa syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang.

Saya mempersembahkan karya ini untuk kedua orang tua kebanggaan saya

Bapak Salamuddin, ST. dan Ibu Mahdalena

Afdika Rinaldi, Andrie Vishkar, dan Nadine Dzulaikha

Keluarga besar Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo

dan

Kepada pembaca

MOTTO

“Tetap semangat dan sukses selalu”

*Jangan takut untuk bermimpi, karena mimpi adalah tempat menanamkan benih harapan
dan memetakan cita-cita*

(Monkey D Luffy)

ABSTRAK

Partai Demokrat merupakan partai dengan perolehan suara tertinggi dan berhasil mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden selama dua periode. Namun, dalam pemilu 2014 partai Demokrat mengalami penurunan suara dan puncaknya di pemilu 2019, khususnya di kota Semarang partai Demokrat berada di urutan kedua terbawah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab penurunan perolehan suara partai Demokrat di kota Semarang pada pemilu legislatif 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan jenis penelitian *field research* dan pendekatan studi kasus. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap narasumber. Penelitian ini menggunakan teori *Crisis Legitimation* oleh Jurgen Habermass dan teori pelebagaan partai oleh Basedau dan Stroh. Hasil dari penelitian ini yaitu partai Demokrat kota Semarang mengalami *crisis legitimation* dikarenakan beberapa kader partai Demokrat terkena kasus korupsi Hambalang, ketiadaan pemimpin partai yang mampu menggantikan kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, politik identitas dari Sukawi Sutarip yang merupakan kader partai Demokrat kota Semarang. Selain itu, disebabkan oleh pelebagaan partai politik yang kurang sempurna oleh partai Demokrat dalam faktor kekuatan organisasi dikarenakan perpindahan kepemimpinan SBY ke AHY dan ketiadaan keterwakilan calon presiden maupun wakil presiden yang berasal dari partai Demokrat serta faktor koherensi dimana partai Demokrat pada pemilu 2019 tidak memiliki posisi yang jelas baik sebagai oposisi maupun koalisi dan mesin partai Demokrat yang tidak bekerja secara optimal..

Kata kunci : Penurunan Suara, Partai Demokrat, Crisis Legitimation, Pelebagaan Partai Politik

ABSTRACT

The Democratic Party is the party with the highest number of votes and succeeded in delivering Susilo Bambang Yudhoyono as president for two terms. However, in the 2014 election the Democratic party experienced a decline in votes and its peak was in the 2019 election, especially in the city of Semarang, the Democratic party came in second bottom. This study aims to analyze the factors causing the decline in the Democratic party's vote acquisition in the city of Semarang in the 2019 legislative elections. The method used in this research is qualitative with a type of field research and a case study approach. The process of collecting data is done by conducting interviews with informants. This study uses the theory of Crisis Legitimation by Jurgen Habermass and the theory of party institutionalization by Basedau and Stroh. The results of this study are that the Democratic party in Semarang is experiencing a legitimation crisis because several Democrat party cadres were involved in the Hambalang corruption case, the absence of a party leader capable of replacing Susilo Bambang Yudhoyono's leadership, identity politics from Sukawi Sutarip who is a cadre of the Democratic party in Semarang. In addition, due to the imperfect institutionalization of political parties by the Democratic party in the organizational strength factor due to the transfer of SBY's leadership to AHY and the absence of representation of presidential and vice presidential candidates from the Democratic party as well as the coherence factor where the Democratic party in the 2019 election does not have a clear position. clear as both an opposition and a coalition.

Keywords : Vote Decline, Democratic Party, Crisis Legitimation, Institutionalization of Political Parties

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Sumber dan Jenis Data.....	14
3. Teknik Pengumpulan Data.....	14
4. Teknik Analisis Data	15
G. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II.....	18
KERANGKA TEORI	18
A. Penjelasan Konseptual.....	18
1. Partai Politik	18
2. Pemilihan Umum	23
B. Teori	23
1. Teori Krisis Legitimasi	23
2. Pelembagaan Partai.....	25
BAB III	33
GAMBARAN UMUM PARTAI DEMOKRAT DAN PARTAI DEMOKRAT KOTA SEMARANG	33
A. Partai Demokrat.....	33
1. Sejarah Partai Demokrat	33
2. Ideologi, Visi dan Misi	35
3. Lambang Partai	37
4. Struktur Kepengurusan Partai Demokrat.....	38
B. Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Semarang	39
1. Struktur Kepengurusan DPC Partai Demokrat Kota Semarang	39
2. Komposisi Fraksi Partai Demokrat Dalam Anggota DPRD Kota Semarang 2019-2024	40
3. Perolehan Suara Partai Demokrat Kota Semarang Dalam Pemilu Legislatif	42
BAB IV	44
PENURUNAN PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT KOTA SEMARANG	44
A. Penurunan Legitimasi Tokoh Pemimpin Partai Demokrat.....	44

B.	Penurunan Legitimasi Kader Partai Demokrat.....	48
1.	Kasus Korupsi Proyek Hambalang	49
2.	Dinasti Politik Partai Demokrat Kota Semarang	52
BAB V.....		57
HUBUNGAN PELEMBAGAAN PARTAI TERHADAP PENURUNAN PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT KOTA SEMARANG.....		57
A.	Kekuatan Organisasi Partai Demokrat kota Semarang	57
1.	Peralihan Kekuasaan Kekuatan Partai Demokrat	61
2.	Ketiadaan Perwakilan Partai Demokrat Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	63
B.	Ketidakserasian Koherensi Partai Demokrat Dalam Pemilu 2019.....	67
1.	Partai Demokrat Memiliki Posisi Yang Tidak Jelas Dalam Pemilu 2019	69
2.	Mesin Partai Demokrat Tidak Bekerja Dalam Pemilu 2019 Kota Semarang.....	72
BAB VI.....		77
PENUTUP.....		77
A.	Kesimpulan.....	77
B.	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA		80
LAMPIRAN.....		83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		89

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perolehan Suara Partai Politik Dalam Pemilu 2009 Jawa Tengah.....	4
Tabel 2 Data Kursi Anggota DPRD Jawa Tengah Periode 2009-2014	4
Tabel 3 Perolehan Suara Partai Politik Dalam Pemilu 2009 Kota Semarang.....	5
Tabel 4 Perolehan Kursi DPRD Jawa Tengah Periode 2014-2019 dan 2019-2024.....	6
Tabel 5 Data Perolehan Suara Partai Demokrat Kota Semarang Dalam 4 Periode	7
Tabel 6 Pelembagaan Partai Politik Menurut Bassedau dan Stroh	30
Tabel 7 Daftar Ketua Umum Partai Demokrat	34
Tabel 8 Daerah Pemilihan Kota Semarang Pada Pemilu 2019	41
Tabel 9 Data Suara dan Kursi Partai Demokrat Dalam 4 Periode di Kota Semarang	47
Tabel 10 Daftar Keluarga Presiden Yang Terjun Ke Dunia Politik.....	53
Tabel 11 Daftar Keluarga Sukawi Sutarip Sebagai Caleg di Jawa Tengah	55
Tabel 12 Tokoh Elit dan Jabatan Dalam Partai Politik	58

DAFTAR GAMBAR

Picture 1 Lambang Partai Demokrat	37
Picture 2 Garis Koorrdinasi Kepengurusan Partai Demokrat	39
Picture 3 Persentase Partai Politik Yang Terlibat Korupsi	50
Picture 4 Permohonan Ijin Penelitian DPD PD Jawa Tengah.....	83
Picture 5 Permohonan Ijin Penelitian DPC PD Semarang.....	84
Picture 6 Dokumentasi Wawancara Bapak Wahyoe Winarto Ketua DPC PD Semarang 85	
Picture 7 Dokumentasi Wawancara Bapak Yunan DE Cabang PD Semarang.....	86
Picture 8 Dokumentasi Wawancara Bapak Ali Mas'adi DE Daerah PD Jawa Tengah.....	87
Picture 9 Dokumentasi Wawancara Bapak Wahyu KH Ketua Bakomstra PD Jateng.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Republik Indonesia merupakan salah satu negara kesatuan yang menganut asas demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi dan produk hukum merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Dalam demokrasi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang ditunjukkan dalam pembuatan keputusan untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan bersama. Dengan kata lain, dalam pembuatan keputusan maupun pembuatan produk hukum harus melibatkan rakyat dalam perumusan. Apabila rakyat tidak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan, maka demokrasi di suatu negara tersebut kurang baik. Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki pemahaman baik itu dalam pembuatan keputusan maupun tentang perpolitikan lainnya.

Dalam menggerakkan sistem perpolitikan di Indonesia, demokrasi merupakan bagian vital yang dapat digunakan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam perpolitikan di Indonesia, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan hak suara pada pemilihan umum (pemilu) atau berpartisipasi dalam pemilihan. Hal tersebut sesuai dengan hak masyarakat sebagai warga negara yang tertuang dalam UU No.39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu.

Penyelenggaraan pemilu terdapat dalam UU No.15 Tahun 2011 pasal 1 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Pasal tersebut menyatakan bahwa pemilu yang diselenggarakan harus secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam sejarah pemilu di Indonesia, telah dilaksanakan sebanyak dua belas kali semenjak pasca proklamasi, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 (Yuwita 2018).

Pemilu yang dilaksanakan pertama kali pada masa reformasi yaitu pada tanggal 7 Juni 1999 dan diikuti sebanyak 48 partai politik. Hal itu tentu berbanding terbalik dengan pemilu yang dilaksanakan ketika zaman orde baru yang hanya diikuti oleh 3 partai politik saja, partai politik tersebut ialah partai

Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Pada pemilu 1999 partai-partai beraliran dan berideologi islam mulai bermunculan, terdapat motif dan kepentingan atas kemunculan partai-partai tersebut (Azhari and Syafiie 2008, hal. 102). Walaupun demikian, sejak tahun 1945, telah bermunculan partai politik yang diklasifikasikan berdasarkan ideologi ataupun visi yang dianut partai politik tersebut. Herbert Feith dan Lance Castle (dalam Munthe 2002) menyebutkan bahwa terdapat 5 tipologi partai politik pada tahun 1955, adapun aliran partai politik tersebut ialah nasionalisme radikal, komunisme, sosialisme demokratik, tradisi Islam, hingga tradisionalisme Jawa. Aliran-aliran dan tipologi yang tercipta memiliki korelasi dengan dunia modern, globalisasi, dan warisan-warisan tradisi baik agama maupun budaya.

Pendapat Herbert Feith dan Lance Castle tidak dapat bertahan lama, terdapat beberapa tipologi partai yang sudah tidak berlaku di zaman sekarang, seperti aliran komunisme dan aliran nasionalisme radikal dikarenakan tuntutan globalisasi. Oleh karena itu muncul pendapat baru yang dirasa lebih sesuai dengan kondisi Indonesia, yaitu pendapat Daniel Dhakidae (2003) yang membagi tipologi partai politik kedalam 4 aliran, yaitu sosialisme, globalisme, developmentalisme, dan kebangsaan. Partai-partai yang memiliki tipologi tersebut yang berjuang dalam pemilu pada tanggal 7 Juni 1999.

Pasca pemilu tahun 1999, partai-partai politik baru mulai bermunculan. Terdapat beberapa alasan dari kemunculan partai-partai politik tersebut, sebagaimana terdapat dalam Tryatmoko (2006) yang menyebutkan bahwa terdapat 3 alasan terbentuknya partai politik baru, pertama partai-partai politik baru merupakan pecahan dari partai-partai politik lama akibat dari rasa kecewa terhadap gaya politik penguasa dari partai yang bersangkutan. Kedua, rasa percaya diri dari yang dimiliki politisi untuk mempertontonkan potensi diri yang lebih marketable dibandingkan masih di partai yang lama. Ketiga, menjual kharismatik tokoh yang dimiliki dengan cara memperluas jaringandari jabatan yang didudukinya ketika itu (Tryatmoko 2016). Hal tersebut juga yang melatarbelakangi lahirnya partai Demokrat.

Tepatnya pada tanggal 9 September 2001 lahirlah sebuah partai baru, partai yang beraliran demokratis yaitu partai Demokrat. Satu hari kemudian pada tanggal 10 September 2001, partai Demokrat didaftarkan ke Departemen

Kehakiman dan HAM RI (Faizal 2005, hal. 44). Meskipun tergolong partai yang masih muda, partai Demokrat tetap ikut dan berpartisipasi dalam pemilu di tahun 2004. Partai Demokrat menjadi salah satu diantara 24 partai politik yang berkompetisi untuk memperebutkan kursi pemerintahan di pemilihan umum legislatif 2004.

Pada pemilu 2004 tersebut, partai Demokrat yang saat itu masih berusia kurang dari 3 tahun menjadi kuda hitam bersama, tidak disangka-sangka partai Demokrat mampu bertengger diposisi kelima perolehan suara tertinggi dengan persentase 7,45% atau 8.455.225 suara. Hasil tersebut membawa partai Demokrat mampu memperoleh 57 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil tersebut juga mengantarkan salah satu pendiri partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden Republik Indonesia keenam dan presiden Republik Indonesia pertama yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat pada tahun 2004 tepatnya pada tanggal 5 Juli (putaran pertama) dan 20 September (putaran kedua).

Pada Pemilu 2009, partai Demokrat yang saat itu berusia 8 tahun semakin mantap dalam memperebutkan kursi pemerintahan. Partai Demokrat yang pada pemilu sebelumnya hanya bertengger diposisi kelima dari 24 partai politik yang bersaing, pada pemilu 2009 partai Demokrat mampu memperoleh suara tertinggi dari 38 partai politik yang bersaing. Partai Demokrat mampu memperoleh suara sebanyak 21.703.137 dengan persentase 20,85% suara dan memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat sebanyak 148 kursi atau dengan persentase 26,42% kursi.

Keberhasilan partai Demokrat di tingkat nasional pada pemilu 2009 otomatis membawa partai Demokrat meraih keberhasilan di tingkat daerah, salah satu daerah yang menjadi daerah kemenangan partai Demokrat ialah Jawa Tengah. Pada pemilu legislatif 2009 partai Demokrat memperoleh suara tertinggi kedua setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berikut disajikan perolehan suara pemilu Jawa Tengah pada pemilu 2009 di Jawa Tengah :

Tabel 1 Perolehan Suara Partai Politik Dalam Pemilu 2009 Jawa Tengah

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	3.305.944
2	Partai Demokrat	2.403.459
3	Partai Golongan Karya (Golkar)	1.923.709
4	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1.186.409
5	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1.076.033
6	Partai Amanat Nasional (PAN)	1.048.197
7	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	926.939
8	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	747.170
9	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	512.541
10	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)	274.769

Sumber : jateng.kpu.go.id

Berdasarkan perolehan suara tersebut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memperoleh suara terbanyak dengan perolehan suara 3.305.944. Diurutan kedua, terdapat partai Demokrat dengan perolehan suara sebanyak 2.403.459 yang kemudian diurutan ketiga diikuti oleh partai Golkar. Partai Demokrat yang pada tahun ini menjadi pemenang di tingkat nasional hanya menduduki peringkat kedua di provinsi Jawa Tengah. Walaupun demikian, pencapaian tersebut merupakan hasil yang dinilai cukup bagi partai Demokrat. Dari hasil tersebut partai Demokrat memperoleh 16 kursi di DPRD Jawa Tengah. Berikut disajikan tabel perolehan kursi anggota DPRD Jawa Tengah periode 2009-2014.

Tabel 2 Data Kursi Anggota DPRD Jawa Tengah Periode 2009-2014

No	Partai Politik	Pemilu 2009
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	23
2	Partai Demokrat	16
3	Partai Golongan Karya (Golkar)	11
4	Partai Amanat Nasional (PAN)	10
5	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	10
6	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	9
7	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	9
8	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	7

9	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	4
10	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)	1
Jumlah Anggota		100

Sumber : www.puskapol.ui.ac.id

Pada pemilihan 2009-2014 terdapat 100 anggota DPRD yang berasal dari 10 partai politik, yaitu PDIP dengan 23 anggota, Demokrat 16 anggota, Golkar dengan 11 anggota, PKS dan PAN dengan masing-masing 10 anggota, PKB dan Gerindra dengan masing-masing 9 anggota, PPP 7 anggota, Hanura dengan 4 anggota dan PKNU dengan 1 anggota. Partai Demokrat menduduki posisi kedua tertinggi perolehan suara di DPRD Jawa Tengah dibawah PDIP. Hal tersebut merupakan imbas dari perolehan suara nasional partai Demokrat yang menjadi pemenang di pemilu 2009.

Perolehan suara dan kursi DPRD Jawa Tengah oleh partai Demokrat berada diposisi kedua setelah PDIP. Namun, hal tersebut berbeda dengan yang terjadi di ibukota provinsi Jawa Tengah, Semarang, dimana partai Demokrat menjadi partai pemenang pada pemilu 2009. Berikut disajikan perolehan suara dari partai politik di kota Semarang pada pemilu 2009 :

Tabel 3 Perolehan Suara Partai Politik Dalam Pemilu 2009 Kota Semarang

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Demokrat	196.766
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	115.172
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	66.248
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	61.764
5	Partai Amanat Nasional (PAN)	48.978
6	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	38.199
7	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	26.063
8	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	23.221
9	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	19.734

Sumber : www.puskapol.ui.ac.id

Dari perolehan suara tersebut, dapat dilihat bahwa partai Demokrat menjadi partai pemenang yang memperoleh suara tertinggi di Semarang dalam pemilu 2009. Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak 196.766 suara diikuti oleh PDIP yang berada diposisi kedua dengan memperoleh sebanyak 115.172 suara. Hasil tersebut mengantarkan partai Demokrat menduduki kursi DPRD kota

Semarang dengan perolehan sebanyak 16 kursi dari 50 kursi yang tersedia. Partai Demokrat menjadi partai mayoritas dengan persentase 32% di DPRD kota Semarang dan diikuti dengan PDIP yang memperoleh 9 kursi.

Kemenangan partai Demokrat ditingkat nasional dan ditingkat daerah tidak dapat dipertahankan pada pemilihan-pemilihan selanjutnya, tepatnya di pemilu 2014 dan pemilu 2019 partai Demokrat mengalami penurunan perolehan suara yang mengakibatkan partai Demokrat kehilangan kursi di DPRD kota Semarang. Berikut disajikan tabel perolehan kursi DPRD kota Semarang selama dua periode :

Tabel 4 Perolehan Kursi DPRD Jawa Tengah Periode 2014-2019 dan 2019-2024

No	Partai Politik	Pemilu 2014	Peringkat	Pemilu 2019	Peringkat
1	PDI-Perjuangan	15	1	19	1
2	Partai Demokrat	6	3	6	2
3	Partai Golkar	5	5	3	6
4	PKB	4	6	4	5
5	PKS	6	3	6	2
6	PAN	4	6	2	7
7	PPP	2	8	0	10
8	Partai Gerindra	7	2	6	2
9	Partai Nasdem	1	9	2	7
10	PSI	-	-	2	7
Jumlah Anggota		50		50	

Sumber : www.puskapol.ui.ac.id

Pada pemilihan 2014-2019 terdapat 50 anggota DPRD yang merupakan kader dari 9 partai politik, dengan rincian PDIP dengan 15 anggota, Gerindra dengan 7 anggota, Demokrat dan PKS dengan 6 anggota, Golkar dengan 5 anggota, PKB dan PAN dengan 4 anggota, PPP dengan 2 anggota, serta Nasdem dengan 1 anggota.

Pada Pemilu terakhir yang dilaksanakan yaitu 2019-2024 terdapat 50 anggota DPDR yang berasal 9 partai politik, diantaranya PDIP dengan 19 anggota, PKS dengan 6 anggota, Gerindra dengan 6 anggota, Demokrat dengan 6 anggota, PKB dengan 4 anggota, Golkar dengan 3 anggota, PAN dengan 2 anggota, Nasdem dengan 2 anggota, PSI dengan 2 anggota dan PPP yang sama sekali tidak mendapatkan perolehan kursi di DPRD kota Semarang.

Tabel 5 Data Perolehan Suara Partai Demokrat Kota Semarang Dalam 4 Periode

Partai Politik	Tahun Pemilu	Perolehan suara partai
Partai Demokrat	2004	130.845
	2009	196.766
	2014	88.946
	2019	67.726

Sumber : www.puskapol.ui.ac.id

Partai Demokrat merupakan salah satu partai yang mengikuti pesta demokrasi pemilihan legislatif untuk memperebutkan kursi DPRD di kota Semarang. Pada tahun 2009 partai demokrat berhasil memperoleh kursi terbanyak di DPRD kota Semarang dengan perolehan suara sebanyak 196.766 suara. Hal tersebut merupakan peningkatan yang dialami partai Demokrat sejak pemilu 2004 hanya memperoleh 130.845 suara. Partai Demokrat saat itu mampu merangkak naik keposisi ke paling atas. Namun, pada pemilihan 2014 partai Demokrat mengalami penurunan perolehan suara DPRD di kota Semarang dengan hanya memperoleh 88.946 suara. Tidak hanya itu, di pemilihan selanjutnya pada tahun 2019 partai Demokrat kembali mengalami penurunan perolehan kursi di DPRD Jawa Tengah dengan hanya memperoleh 67.726 suara. Hal tersebut merupakan penurunan yang dialami partai Demokrat dalam 2 pemilihan di pemilihan 2014 dan pemilihan 2019. Padahal di tahun 2009, partai Demokrat dapat menjadi partai mayoritas yang mendapatkan kursi di DPRD kota Semarang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis penyebab penurunan perolehan suara yang dialami partai Demokrat Jawa Tengah dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penyebab Penurunan Perolehan Jumlah Suara Partai Demokrat Dalam Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019”

Penelitian dan penulisan skripsi ini menganalisis faktor-faktor penyebab penurunan perolehan suara yang dialami oleh partai Demokrat Jawa Tengah padahal dalam pemilu tahun 2009 partai Demokrat merupakan partai pemenang yang memperoleh suara tertinggi kedua setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Provinsi Jawa Tengah.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijabarkan pada point sebelumnya, maka memunculkan beberapa pertanyaan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam proses pengerjaan penelitian ini, yaitu :

1. Mengapa partai Demokrat Kota Semarang mengalami penurunan perolehan suara dalam pemilu 2019 ?
2. Bagaimana hubungan faktor pelebagaan partai terhadap penurunan perolehan suara Partai Demokrat dalam pemilu legislatif kota Semarang pada tahun 2019 berdasarkan aspek pelebagaan partai ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Menjelaskan secara deskriptif mengenai bagaimana Partai Demokrat kota Semarang mengalami penurunan perolehan suara pada pemilihan umum.
2. Mengetahui dan memahami faktor pelebagaan partai yang menjadi sebab penurunan perolehan suara partai Demokrat kota Semarang dalam pemilihan umum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat peneliti dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Akademis
Ikut berpartisipasi dan memberikan sumbangsih dalam bentuk penelitan dan pemikiran untuk Ilmu Politik terkhusus dalam kajian penurunan perolehan suara partai politik yang dalam hal ini yaitu partai Demokrat kota Semarang.
2. Manfaat Praktis
Ikut berpartisipasi dan memberikan sumbangsih kepada praktisi, pembaca, dan peneliti lainnya mengenai penyebab penurunan suara partai Demokrat kota Semarang di pemilihan umum.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa literatur yang akan dijadikan pedoman dalam tinjauan pustaka. Hal itu bertujuan untuk pembanding dan untuk menentukan sisi lain serta fungsi dari penelitian yang dibuat ini. Terkait dengan penelitian tentang penurunan perolehan suara partai politik dalam pemilihan legislatif telah banyak dikaji oleh para peneliti. Penurunan suara partai politik bukanlah hal yang baru dalam penelitian, namun

penurunan perolehan suara partai Demokrat kota Semarang pada pemilu legislatif tahun 2019 yang akan dikaji lebih rinci dalam penelitian kali ini. Terdapat beberapa literatur yang dijadikan pustaka oleh peneliti yang ditemukan untuk digunakan sebagai instrumen perbandingan dalam pembuatan penelitian.

E.1 Studi penurunan perolehan partai politik dalam pemilihan legislatif

Pertama, yaitu karya Sri Dewi Monalisa Siahaan, yang berjudul “*Penurunan Suara Partai Demokrat Dalam Pemilihan Legislatif Provinsi Jambi Tahun 2019*” ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode wawancara terhadap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Jambi dan wawancara dengan pakar politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya penurunan suara Partai Demokrat Provinsi Jambi Tahun 2019 disebabkan karena Partai Demokrat tidak memiliki elit lokal pada batang tubuh Partai Demokrat Provinsi Jambi sehingga masyarakat lebih memilih calon legislatif yang diusung partai lain yang memiliki elit lokal, terjadinya kasus korupsi yang melibatkan beberapa kader partai Demokrat sehingga menyebabkan citra partai Demokrat menurun sehingga menyebabkan penurunan perolehan suara Partai Demokrat pada pemilihan legislatif Provinsi Jambi pada tahun 2019 (Siahaan 2022).

Kedua, yaitu karya Heni Yuwita, yang berjudul “*Penurunan Jumlah Suara Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilihan Umum Legislatif DPRD Di Kota Bekasi Tahun 2014*” ini menggunakan metodologi penelitian pendekatan kualitatif melalui wawancara dan pengumpulan data. Dalam penelitian ini berisi tentang bagaimana Partai Keadilan Sejahtera yang mengalami penurunan perolehan suara setelah pada pemilu 2004 yang merupakan masa jaya Partai Keadilan Sejahtera dengan memperoleh 15,4% suara. Adapun hasil dari penelitian tersebut ialah memberitahukan bahwa Partai Keadilan Sejahtera kurang efektif dalam menegimplementasikan strategi politik sehingga tidak mampu menambah perolehan suara pada dua periode pemilu yaitu tahun 2009 dan pemilu tahun 2014. Namun, Partai Keadilan Sejahtera lebih berhasil dalam menggunakan strategi *direct selling* dibandingkan media massa. Faktor lainnya yang menjadi penyebab penurunan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera karena faktor internal partai dan faktor eksternal Partai Keadilan Sejahtera itu sendiri (Yuwita 2018).

Ketiga, karya Sitaresmi Putri, dalam penelitian yang berjudul “*Penurunan Suara PKB Dalam Pemilu Legislatif 2009 Di Kabupaten Jombang Dan Upaya-Upaya Mengatasinya*” penelitian ini berfokus terhadap penyebab PKB mengalami penurunan perolehan suara pada pemilu 2009 dan bagaimana upaya yang dilakukan PKB untuk memperkuat elektabilitas PKB di kabupaten Jombang. Hasil dari penelitian ini yaitu ditemukannya faktor yang menjadi penyebab menurunnya suara yang diperoleh PKB di Kabupaten Jombang dikarenakan dualisme di internal partai, terpecahnya suara NU, dan adanya praktik *money politik*. Dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat rasa kurang puas dari penganut Nahdatul Ulama (NU) atas Partai Kebangkitan Bangsa yang diyakini sudah menyimpang dan tidak sesuai dengan tujuan pembentukan awal, serta terjadinya hegemoni yang dilakukan oleh kyai-kyai (Puteri 2014).

Keempat, karya Yusril Yuwanda & Iqbal Ahmady, dalam penelitian yang berjudul “*Analisis Penurunan Perolehan Suara Anggota DPD RI Dapil Aceh Pada Pemilu 2019 (Studi Kasus Penurunan Perolehan Suara Fachrul Razi)*”, bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor yang menjadi penyebab menurunnya perolehan suara Fachrul Rozi pada pemilu 2009 dan bagaimana langkah-langkah komunikasi politik antara Eks Kombatan GAM dengan Fachrul Rozi. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa penyebab menurunnya perolehan suara yang didapat Fachrul Rozi dikarenakan tidak mendapat panggung partai Aceh dan dari Eks Kombatan Gam, penurunan basis massa yang memberikan dukungan, dan komunikasi politik yang dibangun Fachrul Rozi berakhir gagal (Yuwanda and Ahmady 2022).

Kelima, karya Ditya Setya Budi & Luthfi Muta’ali, dalam penelitian yang berjudul “*Kajian Geografi Politik Terhadap Perubahan Perolehan Suara Partai Demokrat Pada Pemilu 2009 Dan 2014 Kabupaten Pacitan*”, bertujuan untuk mengetahui distribusi perubahan perolehan suara partai Demokrat dan mengetahui perubahan basis massa pendukung partai Demokrat. Selain itu, penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara faktor geografi suatu daerah dengan suara yang diperoleh partai Demokrat pada pemilu 2014 di Kabupaten Pacitan. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu ditemukannya hubungan antara faktor geografi dan peningkatan perolehan suara yaitu jumlah penduduk wanita memiliki pengaruh yang sangat kuat (Budi P. and Muta’ali 2015).

E.2 Analisis kekalahan pada pemilihan legislatif

Pertama, karya Farhan Saliman, dalam penelitian berjudul “*Faktor-Faktor Di Balik Kekalahan Cagub/Cawagub Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pada Pilgub DKI Jakarta Tahun 2012*” ini merupakan penelitian yang memakai pendekatan studi kasus dengan teknik penelitian deksriptif. Adapun pelaku dalam penelitian ini yaitu Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta. Data yang dikumpulkan merupakan hasil wawancara dan observasi literatur yang memiliki korelasi. Penelitian ini, berisi tentang faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan Cagub/Cawagub Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwasannya strategi yang digunakan DPW PKS DKI untuk memenangkan pilgub DKI Jakarta pada tahun 2012 adalah dengan menggunakan strategi *capacity building*, *institution building*, dan *social building*. Selanjutnya Partai Keadilan Sejahtera menggabungkan politik dengan dakwah yang kolaboratif sehingga politik yang digunakan tidak hanya berdimensi kekuasaan. Selain itu, faktor yang menjadi penyebab kekalahan Partai Keadilan Sejahtera pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2012 yaitu karena calon yang diajukan oleh PKS merupakan kader dari partainya sendiri sehingga dianggap belum merepresentasikan semua masyarakat (Saliman 2015).

Kedua, karya Siti Rahayu, dalam penelitian yang berjudul “*Partai Politik Dan Pemilihan Presiden: Analisis Kekalahan Koalisi Indonesia Kerja Dalam Pemilihan Presiden 2019 Di Kabupaten*” ini termasuk kedalam penelitian kualitatif dan cara yang digunakan untuk memperoleh data adalah dengan melakukan wawancara mendalam kepada lima narasumber. Penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus pada analisis dinamika kekalahan yang dialami Koalisi Indonesia Kerja pada pemilu 2019. Penelitian ini menghasilkan bahwa dinamika yang merupakan dampak dari terbentuknya Koalisi Indonesia Kerja adalah koalisi yang bersifat dinamis karena diisi oleh partai-partai politik yang memiliki kepentingan politik masing-masing. Walaupun didukung oleh partai politik yang beragam, nyatanya koalisi ini belum mampu memenangkan perolehan suara di Kabupaten Tangerang. Adapun faktor yang menjadi penyebab kekalahan koalisi ini di kabupaten Tangerang ialah, kurang solid, pengaruh pilkada DKI yang membentuk perilaku politik masyarakat, anggapan bahwasannya PDIP merupakan partai yang berideologi komunisme, dan

kabupaten Tangerang sejak tahun 2017 sudah menanamkan politik anti Jokowi (Rahayu 2020).

E.3 Analisis faktor yang mempengaruhi penurunan perolehan suara

Pertama, karya Fachri Adnan, dalam penelitian yang berjudul “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilihan Umum*” ini mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilu 1997 di kota Surakarta. Penelitian ini berfokus untuk mencari tahu faktor-faktor yang menjadi penyebab peningkatan perolehan suara PPP di kota Surakarta pada pemilu 1997. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan suara PPP pada pemilu 1997 di kota Surakarta ada dua, yaitu karena kepemimpinan Mudrich SM Sangidu yang merupakan pemimpin organisasi daerah yang merupakan pentolan dalam konteks budaya Jawa dan karena adanya isu kontemporer yang lahir tepat sebelum melaksanakan pemilu, yaitu adanya konflik internal yang dialami oleh PDIP sehingga menguntungkan PPP pada pemilu 1997 di kota Surakarta (Adnan 2002).

Kedua, karya Arizal Saputra & Ubaidullah, dalam penelitian yang berjudul “*Analisis Kegagalan Marketing Politik Partai NasDem Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Aceh*”, menganalisis peran partai NasDem dalam program marketing politik yang dimiliki oleh partai Nasdem dan mencari faktor penyebab penurunan perolehan suara partai NasDem di Aceh pada pemilu 2019. Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menggunakan teknik wawancara sebagai teknik pengumpulan data serta studi pustaka pustaka sebelumnya. Hasil dari penelitian ini memberitahukan bahwasannya partai NasDem belum menggunakan marketing secara optimal dan menurunnya perolehan suara dan kursi partai NasDem disebabkan oleh faktor internal dari partai yang bersangkutan. Selain itu, faktor-faktor eksternal yang berupa pesan-pesan hoax atau kampanye hitam dari media-media sosial yang ditujukan untuk partai NasDem guna memprovokasi masyarakat Aceh (Saputra and Ubaidullah 2021).

Berdasarkan beberapa tinjauan sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan bahwa penelitian yang akan diteliti oleh peneliti akan memiliki beberapa perbedaan dengan karya ilmiah yang dituliskan oleh para penulis-penulis sebelumnya, pada penelitian ini peneliti akan meneliti faktor penyebab

menurunnya perolehan suara Partai Demokrat di Kota Semarang dan faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya perolehan suara yang dimiliki oleh partai Demokrat.

F. Metode Penelitian

Penelitian politik merupakan penelitian yang dilaksanakan guna menjelaskan permasalahan-permasalahan dalam politik, untuk mencari dan memberikan tafsiran pengetahuan yang baru yang berkaitan dengan politik yang dihasilkan oleh ilmuwan-ilmuwan baru (S and Roikan 2019). Metode dalam penelitian kali ini ialah sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif merupakan salah satu proses analisis yang memiliki fokus kepada konstruksi yang tercipta atas interaksi sosial, baik antara individu-individu, individu-kelompok, serta kelompok-kelompok. Dalam jenis analisis yang digunakan ini, berorientasi kepada filosofi konstruksionisme yang memandang bahwa suatu kebenaran merupakan suatu yang bersifat relatif dan subyektif dari sudut pandang individu maupun kelompok masyarakat yang mendiami suatu daerah (Herdiansyah 2015). Diharapkan dalam penelitian ini dapat menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif baik yang berupa lisan maupun tulisan. Dalam penelitian kali ini, yang akan dijadikan objek penelitian oleh peneliti yaitu mantan calon legislatif partai, mantan calon dapil daerah, kader-kader dari Partai Demokrat di kota Semarang, tim sukses partai Demokrat kota Semarang dan beberapa masyarakat kota Semarang. Peneliti akan melakukan interaksi dengan yang bersangkutan untuk melakukan komunikasi dan pengumpulan data dengan narasumber. Adapun langkah yang dilakukan dalam penelitian analisis kualitatif yaitu mengembangkan dan memperinci data yang diperoleh dari narasumber, sehingga dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti sebagai hasil dari permasalahan penelitian.

Selanjutnya pendekatan pada penelitian ini yaitu studi kasus. Menurut Creswell (2017) pendekatan studi kasus ialah kegiatan pendekatan yang mengeksplorasi kehidupan nyata terkait dengan konsep pendidikan politik oleh partai Demokrat dan kendala yang dialami, untuk diubah dan diolah secara mendalam menjadi suatu kesimpulan yang berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber guna memperkokoh data yang ditemukan di lapangan. Sumber data disebut dengan segala sesuatu yang dapat digali informasi mengenai data tersebut. Sumber data dalam penelitian kali ini yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung yang bersumber dari subjek penelitian yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti mendapatkan data atau informasi melalui wawancara dengan informan serta hasil observasi atau temuan yang dilakukan di lapangan. Informan didefinisikan sebagai orang yang dapat memberikan informasi sesuai data dalam fokus penelitian. Adapun yang bertindak sebagai informan dalam penelitian kali ini yaitu kader partai Demokrat kota Semarang.

Data sekunder yaitu data yang dapat digunakan sebagai pendukung dari adanya data primer yang sudah terkumpul. Dalam penelitian kali ini, data sekunder yang digunakan yaitu berupa dokumentasi dari hasil objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa metode teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara ialah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan metode komunikasi tanya jawab yang dilaksanakan dengan sistematis dan sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian (Iqbal 2002). Wawancara dapat memberikan kemungkinan peneliti untuk memberikan analisa dengan cara berkomunikasi seputar tujuan-tujuan, perasaan, dan pendapat, serta prosedur informal dalam wawancara dengan informan yang terkait dengan objek yang diteliti.

Pada teknik penentuan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling yaitu cara yang dilakukan untuk menentukan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan bahwa informan tersebut cocok dan sesuai dengan kajian penelitian yang akan diteliti. Adapun informan yang akan dijadikan sebagai informan utama dalam penelitian ini yaitu Ali Mas'adi selaku mantan calon anggota DPRD kota Semarang

dalam pemilu 2014 dari partai Demokrat. Selanjutnya yaitu snowball sampling dimana penentuan informan selanjutnya didasarkan atas saran dari informan sebelumnya yang dirasa cocok dan sesuai dengan kajian penelitian yang akan diteliti.

b. Dokumentasi

Teknik yang berfungsi sebagai bukti bahwasanya telah dilaksanakan pengumpulan data disebut sebagai dokumentasi. Dokumentasi juga didefinisikan sebagai langkah untuk memperoleh gambaran yang berasal dari kacamata penulis dengan memanfaatkan media tulis atau media lainnya yang disajikan oleh peneliti yang bersangkutan (Herdiansyah 2015).

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis dan mengolah data yang diperoleh pada penelitian kali ini, metode yang digunakan peneliti yaitu analisis data induktif. Analisis data induktif merupakan teknik yang digunakan untuk memberikan analisis terhadap suatu data yang merupakan hasil dari temuan peneliti yang berupa fakta kemudian data-data tersebut disusun menjadi suatu kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam (Salim and Syahrudin 2012), teknik analisis dikelompokkan menjadi tiga, yakni :

a. Reduksi Data

Menyusun dengan memilah data, membuat rangkuman dan memilih poin-poin penting, menyusun berdasarkan sistematika penulisan disertai memberikan gambaran serta penjelasan nyata berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan.

b. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan ialah menyajikan data. Teks naratif maupun tabel dapat digunakan dalam menyajikan data yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya merancang dan menggabungkan data-data yang diperoleh di lapangan untuk diolah dan ditarik sebuah kesimpulan.

c. Menarik Kesimpulan

Langkah selanjutnya setelah menyajikan data ialah menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi data. Hal tersebut dapat dilakukan

dengan cara membaca kembali dan mengkoreksi kembali terhadap data yang telah didapat dilapangan dan disajikan agar hasil yang diperoleh bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam proses-proses yang telah dijabarkan tersebut, proses tersebut merupakan sistem yang saling berhubungan satu sama lainnya dalam proses yang umum dalam pengumpulan data (Salim and Syahrums 2012).

G. Sistematika Penulisan

Dalam menganalisis dan mengolah data yang diperoleh pada penelitian kali ini, metode yang digunakan peneliti yaitu *descriptive analysis* atau analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan teknik yang digunakan untuk memberikan analisis terhadap suatu data yang merupakan hasil dari wawancara dengan informan terkait, yang dalam penelitian kali ini yaitu kader dari partai Demokrat kota Semarang.

BAB I Pendahuluan

Dalam bab I ini diisi dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teoritis

Dalam bab II ini diisi dengan penjelasan mengenai teori partai politik dan teori Krisis Legitimasi oleh Jurgen Habermas yang digunakan untuk melihat permasalahan penelitian.

BAB III Gambaran Umum Partai Demokrat

Dalam bab III ini diisi dengan orientasi umum objek yang akan diteliti yang dalam hal ini yaitu Partai Demokrat yang terdiri dari sejarah berdirinya Partai Demokrat secara umum dan sejarah berdirinya DPD Partai Demokrat kota Semarang.

BAB IV Penurunan Perolehan Suara Partai Demokrat kota Semarang

Dalam bab IV ini diisi dengan hasil analisis data yang ditemukan di lapangan dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian dan analisis data tentang strategi politik partai Demokrat kota Semarang dan hubungan dengan penurunan perolehan suara partai Demokrat dalam pemilu 2019 di kota Semarang.

BAB V Pengaruh pelebagaan partai politik Terhadap Penurunan Suara Partai Demokrat Kota Semarang

Dalam bab V ini diisi dengan pengaruh pelebagaan partai politik yang menjadi penyebab penurunan perolehan suara partai Demokrat dalam pemilihan umum 2019 di kota Semarang.

BAB VI Penutup dan Kesimpulan

Dalam bab VI ini diisi dengan hasil yang disertakan dengan kesimpulan dari temuan data yang diteliti dan berisi masukan dan saran untuk pengembangan penelitian yang akan datang.

BAB II

KERANGKA TEORI

Dalam bab kedua ini, penulis akan memberikan pemaparan mengenai penjelasan konseptual mengenai partai politik dan pemilu legislatif. Selain membahas mengenai definisi partai politik dan pemilu legislatif, bab ini juga membahas mengenai teori yang akan digunakan untuk mengolah dan menganalisis data penelitian. Terdapat dua kerangka teori yang digunakan yaitu teori pelebagaan partai oleh Matthias Basedau dan Alexander Stroh dan teori krisis legitimasi oleh Jurgen Habermas. Teori pelebagaan partai dan teori krisis legitimasi dipakai untuk menjadi landasan dalam mengolah dan menganalisis penurunan perolehan suara partai politik yang dalam hal ini partai Demokrat, dalam pemilihan legislatif DPRD kota Semarang pada tahun 2019.

A. Penjelasan Konseptual

1. Partai Politik

Berdasarkan pemikiran Miriam Budiharjo (2008, hal. 404), partai politik adalah suatu entitas asosiatif terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai, tujuan, dan aspirasi yang searah, dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan mengambil kekuasaan, posisi politik, tetapi langkah-langkah konstitusional.

Sedangkan pendapat dari Sigmund Neumann (Budiardjo 2008, 407) mengatakan bahwasanya partai politik merupakan penghubung langsung yang menyatukan kekuatan serta ideologi sosial antara masyarakat dengan lembaga-lembaga resmi pemerintahan. Partai politik memiliki fungsi yang melekat dan tidak dapat dihilangkan yaitu sebagai sarana sosialisasi dan komunikasi politik. Dalam perkembangannya, sosialisasi dan komunikasi politik yang diberikan khusus kepada kader partai politik dapat menggunakan media massa, diskusi publik, dan sosialisasi. Fungsi bagi tubuh partai politik itu sendiri adalah untuk membuat citra yang menampilkan bahwasanya partai tersebut sedang berjuang untuk kemaslahatan masyarakat dan negara.

Berdasarkan pemikiran dari Riswandha Ismawan (1991), mengungkapkan pendapat bahwa partai politik ialah salah satu alat yang digunakan sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Partai politik memiliki fungsi

utama sebagai artikulasi sekelompok orang dan menempatkan perwakilan dalam instansi-instansi yang memiliki kewenangan dalam menentukan dan menciptakan kebijakan. Hal tersebut bertujuan agar keputusan yang ditentukan dan diciptakan dapat diakui sebagai keputusan bersama antara masyarakat melalui perwakilan dan pemerintahan. Hal tersebut bertujuan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan ciptaan pemerintah yang merupakan cerminan dari kelompok-kelompok perwakilan masyarakat.

Menurut pasal 1 ayat 1 UU RI No.2 Tahun 2008, menjelaskan bahwa arti dari partai politik yaitu sekelompok warga negara yang memiliki kepentingan bersama untuk membela kepentingan kehidupan warga negara.

Berdasarkan pendapat-pendapat ahli dan UU tersebut tentang pengertian partai politik, dapat ditarik kesimpulan bahwa partai politik ialah sekelompok masyarakat yang memiliki tujuan yang sama yang berjuang untuk mendapatkan kekuasaan dan berperan sebagai penyalur ataupun penghubung antara masyarakat dan pemerintahan, serta berperan sebagai perwakilan masyarakat di pemerintahan.

Partai politik pada mulanya lahir di negara-negara Eropa bagian Barat yang dikarenakannya berkembangnya pemikiran bahwa dalam proses politik, rakyat merupakan faktor yang harus diikutsertakan. Oleh karena itu, partai politik lahir secara spontan dan berkembang yang memiliki fungsi sebagai jembatan atau penghubung antara pemerintahan dengan rakyat (Labolo and Ilham 2015).

Kemunculan partai-partai politik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari lahirnya iklim kebebasan yang besar bagi masyarakat Indonesia pasca-runtuhnya penjajahan. Indonesia merupakan negara yang merdeka setelah menyerahnya Jepang kepada sekutu, tepatnya pada Agustus 1945. Indonesia menyatakan kemerdekaan melalui pembacaan teks proklamasi oleh Ir. Soekarno dan didampingi oleh Moh. Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembentukan partai politik bukanlah menjadi suatu hal yang urgensi yang dilakukan pemerintahan Indonesia dimasa awal kemerdekaan. Pemerintahan Indonesia kala itu lebih memilih fokus untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan serta membangun Indonesia daripada memikirkan pemilu dan mendirikan partai-partai politik. Namun perlu diingat bahwa partai-partai tersebut sebenarnya sudah terbentuk bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka

dan menjadi alat untuk memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Partai-partai tersebut menggunakan kemampuan diplomasi dan organisasi yang progresif untuk berjuang menuju kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, partai politik dapat disebut sebagai salah satu penentu bagi pembentukan kemerdekaan Indonesia (Jurdi 2020).

Partai politik di Indonesia juga terlahir karena faktor karakteristik masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat majemuk. Menurut John Furnival dalam (Marijan 2010) bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural, yang apabila didefinisikan sebagai masyarakat yang merupakan gabungan dari dua, tiga, atau bahkan lebih elemen atau tatanan sosial yang memiliki ketergantungan dan hidup bergantung antara satu dengan lainnya. Walaupun menurut pemikiran John Furnival masyarakat Indonesia tidak pernah bertemu dalam unit-unit politik, dalam realitanya di Indonesia masyarakat majemuk tersebut akhirnya bersatu dan berkumpul dalam suatu unit politik yang lebih besar yang pada saat ini disebut sebagai partai politik (Labolo and Ilham 2015).

Adapun perkumpulan pertama di Indonesia yang merupakan cikal bakal terbentuknya partai-partai politik lain di Indonesia ialah Budi Utomo yang merupakan perkumpulan kaum-kaum terpelajar. Pasca lahirnya perkumpulan Budi Utomo, terbentuklah dua organisasi yaitu Sarekat Islam dan Indische Partij yang disebut sebagai partai politik pertama di Indonesia. Kemunculan kedua partai politik tersebut menjadi ancaman bagi Budi Utomo karena banyak anggotanya yang memilih bergabung ke dalam kedua partai tersebut. Oleh karena itu, Budi Utomo mulai masuk dan terjun terhadap kegiatan-kegiatan politik pada saat itu.

Selain ketiga partai politik tersebut, muncul organisasi yang didirikan di Semarang oleh orang-orang Belanda seperti H.J.F.M. Sneevliet sebagai pemrakarsa dan diikuti oleh orang-orang sosialis lainnya seperti J.A. Brandsteder, H.W. Dekker, dan Bergsma yang diberi nama Indische Sociaal-Democratische Vereniging (ISDV) pada tanggal 9 Mei 1914 sebagai upaya untuk menyebarkan paham Marxisme di Indonesia (Gustiawan and Anwar 2022). Pada tanggal 23 Mei 1920, ISDV berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia dan diketuai oleh Semaun dan Darsono menjabat sebagai wakil ketua PKI yang merupakan tokoh terkemuka dari partai Sarekat Islam.

Munculnya dan lahirnya partai-partai tersebut memplopori lahirnya partai-partai baru lainnya diantaranya Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Meskipun Muhammadiyah memiliki kaitan dengan organisasi politik Islam, Muhammadiyah mengklarifikasi bahwasanya mereka bukan sebagai partai politik. K.H. Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah memiliki tujuan untuk mengajak umat Islam untuk kembali kepada pedoman hidup yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Muhammadiyah juga menyarankan umat Islam untuk terus berjuang dan berbagi kebaikan serta beramal dalam organisasi ini (Karim 1983).

Pada saat kemerdekaan Republik Indonesia, pada tahun 1945, Indonesia dipimpin oleh Ir. Soekarno sebagai presiden pertama di Indonesia. Selama pemerintahan Ir. Soekarno, partai politik mengalami kondisi pasang surut yang begitu dinamis. Hal itu dikarenakan pada saat itu, Indonesia menerapkan dua bentuk demokrasi yaitu Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Partai politik memiliki pengaruh yang sangat besar pada masa Demokrasi Liberal dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal tersebut dibuktikan dengan singkatnya umur kabinet-kabinet Indonesia pada saat itu karena Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sering mengeluarkan mosi tidak percaya yang tercatat telah dilakukan sebanyak tujuh kali.

Kondisi politik dan pemerintahan yang tidak stabil kala itu disebabkan oleh kepentingan-kepentingan yang sangat kuat dari masing-masing partai politik yang memiliki tujuan untuk bergabung dengan pemerintahan. Hal itu diperkuat dengan sistem kepartaian yang dianut pada masa itu, yaitu sistem multipartai. Melihat kondisi yang semakin tidak dapat dikendalikan, maka Ir. Soekarno menciptakan Dekrit Presiden yang berisi tentang pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 (Labolo and Ilham 2015 hal 103).

Selanjutnya, pada masa Demokrasi Terpimpin atau biasa disebut sebagai masa Orde Lama ditandai dengan dominasi presiden yang sangat kuat, terbatasnya peranan dari partai politik, berkembangnya pengaruh-pengaruh komunisme, dan keikutsertaan ABRI sebagai unsur politik (Budiardjo 2008). Pada masa ini, partai politik kehilangan kekuatannya dan kehilangan hak-hak berkespresi sebagaimana pada masa Demokrasi Liberal. Melalui Peraturan

Presiden pada tahun 1959, Ir. Soekarno mengurangi jumlah partai politik pada saat itu yang awalnya menerapkan sistem multipartai dan akhirnya hanya tersisa sepuluh partai politik saja dan didalamnya termasuk NU, PNI dan golongan komunis. Kekuatan yang ada saat itu, yaitu Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom) membuat partai politik seakan mati suri, sehingga pada tahun 1960 pemilu tidak dilaksanakan.

Selanjutnya, pada pemerintahan Soeharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia, partai politik kembali mengalami disfungsi, pada masa itu disebut sebagai masa Orde Baru. Pada awal kepemimpinan, Soeharto menggunakan sistem multipartai, namun pada tahun 1973 terjadi fusi partai politik atau penggabungan partai politik yang mengakibatkan partai politik pada saat itu hanya terdiri dari tiga partai politik diantaranya Golkar, PDI, dan PPP. Fusi partai politik tersebut mengakibatkan banyaknya aspirasi masyarakat yang tidak tersalurkan karena dominannya peran pemerintahan. Hal itu dibuktikan dari hasil pemilu yang terlaksana enam kali pada masa Orde Baru selalu dimenangkan oleh partai Golkar yang merupakan partai pemerintahan (Di et al. 2016).

Pasca 1998, yang merupakan akhir dari pemerintahan Orde Baru, digantikan oleh era Reformasi yang dinilai lebih demokratis. Presiden BJ. Habibie kembali menerapkan sistem multipartai dan dinilai sebagai kembali hidupnya sistem kepartaian dan kekuatan partai-partai politik. Selain itu, pada masa ini partai politik juga boleh menggunakan ideologi lain sebagai ideologi partai tidak harus menggunakan ideologi pancasila dengan catatan tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai pancasila (Jurdi 2020). Hal tersebut menjadikan antusiasme masyarakat sangat tinggi dalam berpolitik, tercatat pada tahun 1999 terdapat 141 partai politik dan 48 diantaranya dinyatakan memenuhi syarat untuk dapat berkompetisi dalam Pemilu. Namun, karena partai politik terlalu ambisius dalam menghadapi pemilu menjadikan partai politik lebih pragmatis dan lambat laun menjadi partai catch-all yang ingin mengambil seluruh basis pemilih. Keadaan tersebut, menurut Giovanni Sartori sebagai proses depolarisasi yang pada gilirannya akan sampai pada suatu konsensus sistem multipolar yang cenderung bersifat sentrifugal (Soim 2018).

2. Pemilihan Umum

Pemilu merupakan singkatan dari pemilihan umum merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia setiap 5 (lima) tahun sekali. Menurut William Lidle (dalam Efriza 2012) menyatakan bahwa pemilu sering dianggap sebagai penghubung antara kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan sejumlah elit, masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dapat memberikan hak suara yang merupakan kehendak rakyat yang diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam undang-undang yang mengatur pemilihan umum.

Menurut Aurel Croissant pemilu adalah kondisi yang wajib dilaksanakan dalam demokrasi, oleh karena itu pemilu tidak hanya mencerminkan kehendak rakyat dan merupakan partisipasi rakyat dalam demokrasi semata, melainkan juga melegitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintahan (Setiawan 2020).

Pemilu 2019 merupakan pemilihan yang dilakukan di Indonesia untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sistem pemilu di Indonesia menggunakan sistem proposional, dengan kata lain satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil dari partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu. Sistem pemilu proposional mengakomodir suara konstituen, sehingga hasilnya lebih representatif. Dengan sistem ini, hak-hak politik kaum minoritas lebih diakui dan dihargai serta memberikan ruang publik antar partai politik untuk lebih bersaing (Kartikasari 2020).

B. Teori

1. Teori Krisis Legitimasi

Teori krisis Legitimasi (*Crisis Legitimation*) dijelaskan oleh Habermas (1973) bersama dengan bentuk krisis lainnya, seperti krisis ekonomi, krisis rasionalitas, dan krisis motivasi. Krisis Legitimasi dapat terjadi apabila rakyat sudah tidak memberikan dukungan kepada pemerintahan yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang tidak adil. Dengan kata lain, krisis legitimasi mengacu kepada mengurangnya rasa percaya masyarakat terhadap fungsi-fungsi administratif, lembaga ataupun pemimpin. Habermas mengklaim bahwa apabila lembaga ataupun organisasi tidak memiliki keahlian yang mempunyai

dibidang administrasi untuk mempertahankan atau membangun struktur yang efektif guna mencapai tujuan bersama yang dimiliki lembaga atau organisasi tersebut merupakan syarat dari krisis legitimasi (Habermas 2004).

Menurut Max Weber (1968, dalam Habermas, 2004: 274) mengenai otoritas absah menuntut perhatian terhadap hubungan antara rasa percaya masyarakat dengan legitimasi sebuah tatanan (*ordnungen*) beserta keahliannya dalam memberikan keadilan kepada suatu sisi, dan kebenaran sesuai fakta di sisi lainnya. Berdasarkan hakekatnya konsep legitimasi mengarah pada otoritas legal-rasional, dan rasionalitas hanya berupa dekade namun dapat disamakan menjadi kekuasaan legal rasional yang tidak netral nilai dan asli rasional bertujuan (Habermas 2004:283).

Krisis dianggap lahir jika susunan sebuah sistem sosial tidak mampu memberikan kemungkinan solusi dari suatu permasalahan untuk menjaga keutuhan sistem sosial tersebut (Hardiman 1993). Berdasarkan pandangan Habermas, krisis dipandang sebagai pertentangan yang menyatu dalam sebuah sistem dan pada akhirnya dapat membuat perubahan sistem sosial tersebut, krisis merupakan fenomena yang objektif sekaligus eksternal, dalam bahasa yang sederhana krisis harus dilihat melalui dua paradigma yaitu paradigma dunia kehidupan (*labenswelt*) dan paradigma sistem. Perbedaan antara paradigma dunia kehidupan (*labenswelt*) dengan paradigma sistem yaitu paradigma dunia kehidupan lebih mengarah terhadap struktur-struktur normatif (nilai-nilai dan institusi-intisitusi) masyarakat, sedangkan paradigma sistem mengarah kepada mekanisme dalam mengendalikan masyarakat. Oleh karena itu, sistem sosial dipandang sebagai dunia kehidupan sebuah dunia yang dipahami oleh penghuni-penghuninya dan memiliki struktur secara simbolik, dalam masyarakat kapitalis terjadi krisis keluaran dalam bentuk krisis rasionalitas, yaitu sistem administrasi gagal dalam menyelesaikan permasalahan serta gagal untuk memuaskan imperatif-imperatif sistem ekonomi. Krisis masukannya (*input*) dalam bentuk krisis legitimasi, yaitu sistem legitimasi gagal mempertahankan kesetiaan massa (Syafrianti 2018).

Krisis legitimasi merupakan defisit legitimasi yaitu sarana administratif tidak mampu menjaga dan menentukan struktur normatif yang didukung oleh motivasi yang cukup, maka dari itu penyebab dari krisis legitimasi adalah krisis motivasi yang disebabkan oleh terjadinya perubahan

sistem sosio-kultural yang mengesampingkan makna. Krisis legitimasi dimunculkan oleh keinginan terhadap legitimasi yang timbul dari perubahan dalam sistem politik dan tidak terpengaruh oleh legitimasi yang ada (Habermas 2004, 185).

Terjadinya krisis legitimasi merupakan tahap awal yang menjadi tanda akan terjadinya krisis politik. Krisis legitimasi terjadi karena menurunnya rasa percaya masyarakat terhadap pemimpin. Penyebaran krisis legitimasi tidak hanya di pusat, namun akan berdampak dan menyebar ke daerah daerah. Walaupun demikian, krisis legitimasi tidak menghilangkan kultur warisan dari pemerintahan sebelumnya, dengan kata lain, krisis legitimasi tidak melakukan perubahan sistem struktur pemerintahan (Abrori 2016).

Krisis legitimasi biasanya terjadi pada masa transisi. Maksudnya perubahan dari masyarakat tradisional yang berstruktur kompleks. Selain itu, perubahan yang terjadi dari satu tingkat dan kualitas perkembangan yang satu menuju ke tingkat dan kualitas perkembangan masyarakat berikutnya. Masyarakat yang sudah atau lebih rasional, kritis dan penuh alternatif terhadap proses politik. Masyarakat seperti ini cenderung mempertanyakan setiap kewenangan yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Apabila pihak yang berwenang tidak tanggap atas perubahan aspirasi masyarakat, sikap mempertanyakan berubah menjadi meragukan keabsahan kewenangan pemerintah sehingga dukungan kepada pemerintahan memudar. Pengakuan dan dukungan yang memudar disebut krisis legitimasi. Dengan krisis legitimasi lembaga atau organisasi tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan atau membangun struktur yang efektif dalam mencapai tujuan akhir mereka (Mulyana and Hasan 2020).

2. Pelebagaan Partai

Dalam memecahkan masalah dan menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan teori pelebagaan partai. Terkait masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai hubungan antara pelebagaan partai dengan penurunan perolehan suara partai Demokrat dalam pemilu legislatif kota Semarang 2019. Peneliti menggunakan beberapa teori dan konsep yang relevan dan sesuai dengan penelitian tersebut. Adapun teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu teori pelebagaan partai dari Matthias Basedau dan Alexander Stroh. Teori dan pendekatan yang digunakan harus relevan dan

sesuai dengan tema penelitian, hal itu bertujuan agar penelitian lebih terstruktur dan mendalam dalam menemukan jawaban antara pengaruh dari teori pelebagaan partai politik dengan penurunan perolehan suara partai Demokrat.

Beberapa ahli telah memberikan pemikiran dan teori mereka masing-masing mengenai pelebagaan partai politik. Teori pelebagaan partai politik oleh Basedau dan Stroh merupakan penyempurnaan teori pelebagaan politik oleh Randall dan Svasand. Pelebagaan politik menurut Randall dan Svasand yaitu pelebagaan partai dinilai sebagai sebuah proses dalam penyempurnaan partai politik berdasarkan aspek-aspek struktural dan kultural yang diaplikasikan dalam etika dan budaya (Svasand and Randall 2002).

Sesuai dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Randall dan Svasand mengenai pelebagaan partai politik, mereka menyampaikan bahwa proses penyempurnaan partai politik berdasarkan aspek-aspek struktural dan kultural yang diaplikasikan dalam etika dan budaya disebut sebagai pelebagaan partai politik. Dalam proses pelebagaan partai terdapat empat aspek yang kemudian dibagi menjadi dua aspek oleh Randall, adapun aspek-aspek tersebut ialah aspek internal-eksternal dan aspek struktural-kultural. Berdasarkan teori tersebut, Basedau dan Stroh menyempurnakan konsep dari Randall dan Svasand dimana mereka menyebutkan terdapat empat pelebagaan partai politik yang diantaranya pengakaran di masyarakat, aspek otonomi, organisasi, dan koherensi. Mengenai prinsip-prinsip umum dalam menghitung pelebagaan partai terdapat tiga wawasan teoritis utama. Pertama, perlu dilakukan pengukuran terhadap pelebagaan partai politik yang terpisah dari pelebagaan sistem kepartaian. Kedua, pada dasarnya pelebagaan partai merupakan tentang meningkatkan stabilitas, kualitas, dan pemasukan nilai. Terakhir, melebagaan organisasi merupakan suatu hubungan antara internal dan eksternal. Teori pelebagaan partai oleh Basedau dan Stroh merupakan hasil dari modifikasi dan pengembangan atas teori pelebagaan partai sebelumnya yang dikemukakan oleh Randal dan Svasand (Svasand and Randall 2002).

Selain itu, Samuel P. Huntington (1973) mengemukakan pendapatnya mengenai pelebagaan partai bahwa pelebagaan merupakan suatu langkah dalam suatu prosedur dan pengorganisasian mengandung nilai dan stabilitas. Selanjutnya, Huntington menjelaskan lebih rinci bahwasanya dalam

pelebagaan partao politik terdapat empat aspek utama, yaitu penyesuaian diri-kekuatan, komplektisitas-kesederhanaan, otonomi-subordonasi, dan koherensi-perpecahan. (Romli 2016)

Dalam sistem demokrasi yang memiliki banyak partai atau dengan kata lain multipartai, partai politik memiliki alasan utama yaitu untuk mengorganisir kompetisi politik dan untuk memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan, dengan kata lain partai politik dan demokrasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Basedau dan Stroh menjelaskan bahwa pelembagaan partai merupakan suatu proses yang dialami oleh suatu partai politik yang mengikuti kontestasi pemilihan umum dan mengalami peningkatan stabilitas serta nilai-nilai organisasi. Peningkatan nilai nilai diartikan oleh sebagian orang yang relevan dalam hal ini anggota partai dan pemilih yang meyakini bahwa partai politik dalam demokrasi tidak bisa dilupakan (Syafridho 2022).

Dalam masyarakat, partai politik memiliki akar yang kuat dan stabil, otonomi mengarah terhadap sejauh mana partai politik dapat menerapkan prinsip independen dari individu baik dari batang tubuh partai politik itu sendiri maupun dari luar partai politik. Dimensi organisasi mengarah terhadap sejauh mana kader partai hadir secara berkelanjutan dalam semua level administrasi dan bertindak sesuai ideologi partai, serta turut aktif dalam kegiatan-kegiatan partai politik baik dalam masa pemilu seperti kampanye maupun kegiatan diluar pemilu. Sedangkan koherensi mengarah pada partai politik sebagai suatu kesatuan organisasi yang selalu menjaga keharmonisan dan perdamaian serta memiliki toleransi yang tinggi atas perselisihan dalam partai politik (Sigit 2011).

Dalam penjelasan lebih lanjut mengenai modifikasinya terhadap teori pelembagaan partai politik oleh Randal dan Svasand yang mengelompokan pelembagaan partai, Basedau dan Stroh membagi klasifikasi pelembagaan partai kedalam empat dimensi indeks kelembagaan, yaitu sebagai berikut :

a. Mengakar Dalam Masyarakat (*roots in society*)

Partai politik yang dikelola dan dikembangkan dengan baik, harus memiliki kestabilan yang mengakar di masyarakat. Dengan kata lain, partai politik harus menarik simpati dan memiliki ruang khusus di hati masyarakat itu sendiri. Mendapatkan ruang khusus di hati masyarakat bukanlah

persoalan yang mudah, perlu waktu yang lama dan tidak didapatkan secara instan. Partai politik harus memberikan bukti bahwa partai tersebut sudah melaksanakan fungsi-fungsi partai politik dalam menyikapi persoalan yang terjadi di masyarakat dan menjadi wadah aspirasi bagi masyarakat. Apabila fungsi-fungsi partai politik telah dilaksanakan dengan baik maka akan mendapatkan respon positif dari masyarakat.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Basedau dan Stroh menyebutkan setidaknya terdapat tiga indikator yang dapat menjadi faktor suatu partai mendapatkan tempat khusus di hati masyarakat, dengan kata lain sudah memenuhi indeks mengakar dalam masyarakat. Usia partai relatif terhadap kemerdekaan, dengan kata lain semakin tua umur dari suatu partai politik yang hadir pasca kemerdekaan maka akan menjadi partai yang terkenal dan familiar di masyarakat. Selanjutnya, usia partai relatif terhadap periode multipartai yang memiliki arti kurang lebih serupa dengan yang pertama, maka apabila terjadi sistem multipartai maka partai yang sudah mendapatkan atensi dan familiar di masyarakat tidak perlu khawatir. Terakhir, yaitu tautan ke sipil organisasi masyarakat ialah partai politik harus memiliki koneksi dengan masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan untuk memperluas dan memperkenalkan partai politik tersebut kepada masyarakat agar masyarakat luas lebih mengenal partai tersebut.

b. Otonomi (*autonomy*)

Partai politik memiliki tantangan untuk menyeimbangkan antara pelembagaan yang mengakar dalam masyarakat dengan otonomi organisasi. Adapun maksud dari otonomi ialah partai politik wajib mempunyai peranan yang vital dalam setiap kebijakan yang dibuat pemerintahan serta sikap untuk keberlangsungan organisasi. Partai politik yang solid dalam pelembagaan tidak akan mudah dipengaruhi atau terintervensi dari pihak-pihak lain dalam menentukan sikap dan kebijakan. Intervensi dari pihak-pihak individu yang kuat dan berada didalam partai hampir tidak dapat dihindari, namun partai politik dapat meminimalisir hal-hal yang demikian.

Hal tersebut bisa diartikan bahwa penanaman nilai-nilai dalam internal partai tidak mungkin dapat diaplikasikan dan diserap secara keseluruhan apabila kader-kader partai yang adadidak memiliki sikap

independen terhadap berbagai pengaruh. Intervensi dari orang-orang yang memiliki kekuasaan akan hadir untuk mendapatkan akses kekuasaan. Otonomi yang baik dan tegas dapat meminimalisir intervensi dari orang-orang yang memiliki pengaruh untuk menjadikan partai politik hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan individu dan kelompok-kelompok tertentu.

c. Kekuatan Organisasi (*level of organization*)

Ditingkat internal, partai politik harus memiliki kekuatan organisasi untuk mengukur seberapa besar terlembaganya suatu partai politik. Kekuatan organisasi digunakan partai untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan untuk menambahkan spirit perjuangan bagi setiap individu kader partai di dalam tubuh internal partai politik tersebut. Militansi yang dimiliki setiap insan kader partai politik dalam menjalankan fungsi partai politik sesuai ideologi, visi, dan misi yang dimiliki partai politiknya secara baik dapat dijadikan sebagai tolak ukur kekuatan organisasi. Selain itu, untuk mengukur kekuatan organisasi yang dimiliki suatu partai politik dapat dilihat dari seberapa tepat sasaran partai politik melaksanakan kongres partai sesuai yang tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang dimiliki oleh masing-masing partai politik. Kekuatan organisasi partai politik juga dipengaruhi oleh kader-kader dan anggota yang dimiliki oleh partai tersebut, apabila didalamnya terdapat kader yang berkualitas, maka dapat meningkatkan kekuatan organisasi yang dimiliki oleh partai tersebut. Tingkat pemeliharaan kantor pusat, absensi personel, dan sumber daya materi atau peralatan yang dimiliki untuk menunjang kinerja kader seperti kantor, komputer, dan materi informasi, serta keaktifan partai di segala bidang walaupun bukan dalam masa kampanye pemilu.

d. Koherensi (*coherence*)

Pada dasarnya, partai politik harus bergerak dan melakukan tindakan sebagai satu kesatuan organisasi, bukan perorangan atau kelompok di dalam partai politik tersebut. Koherensi dapat diterjemahkan bagaimana suatu partai politik mampu mentoleransi serta menengahi perselisihan yang terjadi dalam internal partai. Oleh karena itu, koherensi memiliki tujuan utama untuk menyamaratakan visi misi dan arah tujuan partai. Menurut

Basedau dan Stroh, terdapat dua indikator kualitatif yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat koherensi yang dimiliki oleh partai politik. Pertama, prevelansi (jumlah anggota yang memberontak) penyeberangan dan/atau pemberontakan dari kelompok parlemen selama masa legislatif. Pemimpin-pemimpin partai dapat melakukan toleransi terhadap beberapa kader partai yang memberontak tanpa menggunakan kekerasan verbal, ancaman, atau upaya pengusiran. Hal tersebut dapat ditoleransi apabila pelanggaran yang dilakukan bukan merupakan pelanggaran besar yang bertolak belakang dengan anggaran dasar serta prinsip-prinsip partai. Kedua, sifat politik intrapartai didapat melalui evaluasi politik faksional oleh divisi atau badan-badan didalam internal partai. Keberagaman divisi atau badan dalam suatu partai tidak dapat dikatakan sebagai masalah, selama terjalin keharmonisan antar kelompok tersebut (Basedau and Stroh 2011).

Hubungan yang berkala harus diciptakan untuk meningkatkan keharmonisan dalam internal partai. Dalam mencapai keselaran dan kesatuan dalam pergerakan organisasi akan mudah dijalankan apabila memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang pentingnya keharmonisan dalam internal partai politik. Koherensi dilakukan untuk menciptakan partai politik yang stabil dan minim penyimpangan serta konflik di dalam internal partai.

Tabel 6 Pelembagaan Partai Politik Menurut Basedau dan Stroh

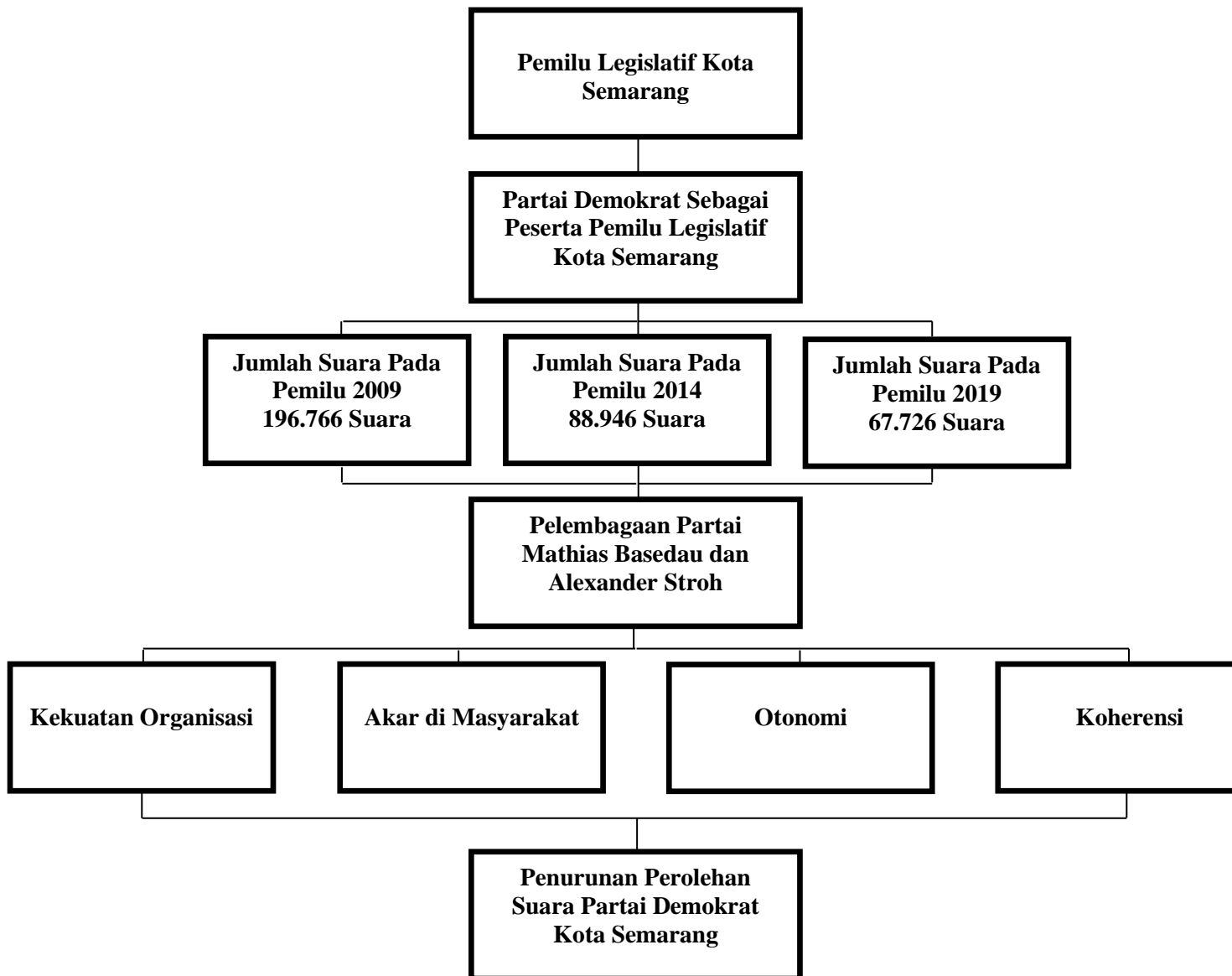
	Eksternal	Internal
Stability	Roots in society	Level of organization
Value Infusion	Autonomy	Coherence

Sumber : Basedau dan Stroh (Basedau and Stroh 2011)

Berdasarkan pemikiran Basedau dan Stroh, dari keempat dimensi pelembagaan partai politik, terdapat indikator yang dapat digunakan untuk menilai pelembagaan partai politik, sehingga dalam penelitian ini teori yang digunakan ialah teori pelembagaan partai politik menurut Basedau dan Stroh. Partai Demokrat kota Semarang merupakan partai yang selalu mengikuti kontestasi pemilihan legislatif, serta menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak pada tahun 2009 dengan total 196.766 suara. Hasil tersebut merupakan peningkatan yang dialami oleh partai Demokrat daripada pemilu

2004 yang memperoleh hanya 130.845 suara. Namun, pada pemilu 2014 partai Demokrat mengalami penurunan suara dan hanya memperoleh 88.946 suara. Tidak hanya itu, di pemilihan selanjutnya pada tahun 2019 partai Demokrat kembali mengalami penurunan perolehan kursi di DPRD Jawa Tengah dengan hanya memperoleh 67.726 suara.

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan diatas, peneliti berusaha membangun kerangka berpikir dengan asumsi bahwa faktor penurunan jumlah suara partai Demokrat kota Semarang disebabkan karena lemahnya kekuatan organisasi dan koherensi partai Demokrat kota Semarang yang merupakan faktor internal dari pelebagaan partai menurut Basedau dan Stroh. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori pelebagaan partai oleh Basedau dan Stroh.



Bagan 1 Kerangka Pemikiran Berdasarkan Teori Mathias Basedau dan Alexander Stroh

BAB III

GAMBARAN UMUM PARTAI DEMOKRAT DAN PARTAI DEMOKRAT KOTA SEMARANG

Kajian mendalam mengenai gambaran umum dari objek penelitian yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu sejarah lahirnya partai Demokrat, visi misi dan fungsi serta tujuan partai Demokrat, dan sejarah berdirinya serta gambaran umum dari partai Demokrat di kota Semarang. Selain itu, bab ini juga memberikan penjelasan singkat tentang lahirnya kota Semarang.

A. Partai Demokrat

1. Sejarah Partai Demokrat

Partai politik pada mulanya lahir di negara-negara Eropa bagian Barat yang dikarenakannya berkembangnya pemikiran bahwa dalam proses politik, rakyat merupakan faktor yang harus diikutsertakan. Oleh karena itu, partai politik lahir secara spontan dan berkembang yang memiliki fungsi sebagai jembatan atau penghubung antara pemerintahan dengan rakyat (Labolo and Ilham 2015).


Kemunculan partai-partai politik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari lahirnya iklim kebebasan yang besar bagi masyarakat Indonesia pasca-runtuhnya penjajahan. Indonesia merupakan negara yang merdeka setelah menyerahnya Jepang kepada sekutu, tepatnya pada Agustus 1945. Indonesia menyatakan kemerdekaan melalui pembacaan teks proklamasi oleh Ir. Soekarno dan didampingi oleh Moh. Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembentukan partai politik bukanlah menjadi suatu hal yang urgensi yang dilakukan pemerintahan Indonesia dimasa awal kemerdekaan. Pemerintahan Indonesia kala itu lebih memilih fokus untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan serta membangun Indonesia daripada memikirkan pemilu dan mendirikan partai-partai politik. Namun perlu diingat bahwa partai-partai tersebut sebenarnya sudah terbentuk bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka dan menjadi alat untuk memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Partai-partai tersebut menggunakan kemampuan diplomasi dan organisasi yang progresif untuk berjuang menuju kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, partai politik dapat disebut sebagai salah satu penentu bagi pembentukan kemerdekaan Indonesia (Jurdi 2020).

Partai Demokrat merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang lahir pasca masa orde baru. Partai Demokrat berdiri pada tanggal 9 September 2001, namun baru disahkan pada tanggal 27 Agustus 2003. Partai ini didirikan sebagai alat

atau kendaraan politik yang akan mengantarkan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan pada pemerintahan Megawati kala itu, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi presiden pada pemilu yang akan datang. Oleh karena itu, kekuatan partai Demokrat memiliki keterkaitan dengan sosok yang akrab disapa SBY tersebut. Pendirian partai Demokrat dan rencananya untuk menduduki kursi presiden berjalan lancar dan berhasil mengantarkan SBY menjadi Presiden Republik Indonesia selama dua periode (2004-2009 dan 2009-2014). Selain itu, SBY juga menjadi ketua umum partai Demokrat pada 30 Maret hingga 12 Mei 2015 melalui kongres luar biasa partai Demokrat di Bali.

Tabel 7 Daftar Ketua Umum Partai Demokrat

NO	Foto	Nama	Masa Jabatan	Periode
1.		Subur Budhisantoro	10 September 2001 – 23 Mei 2005	1
2.		Hadi Utama	23 Mei 2005 – 23 Mei 2010	2
3.		Anas Urbaningrum	23 Mei 2010 – 23 Februari 2013	3
4.		Susilo Bambang Yudhoyono	30 Maret 2013 – 12 Mei 2015	4
			12 Mei 2015 – 15 Maret 2020	5

5.		Agus Harimurti Yudhoyono	15 Maret 2020 - Petahana	6
----	---	-----------------------------	-----------------------------	---

Sumber: <https://www.demokrat.or.id/>, diakses pada tanggal 29 Desember 2022 pukul 19.28

Pada awal kepemimpinan partai Demokrat oleh Subur Budhisantoro dan Hadi Utama tidak begitu banyak memunculkan polemik yang menjadi sorotan media dibanding dengan kepemimpinan setelahnya. Kepemimpinan oleh Anas Urbaningrum yang merupakan ketua umum ketiga partai Demokrat terjadi kasus Hambalang yang berakibat terjadinya polemik besar yang menjadikan Partai Demokrat menjadi sorotan di berbagai media. Kasus tersebut menimpa ketua umum Anas Urbaningrum yang mendapat penilaian negatif dari berbagai kalangan masyarakat. Dampak dari kasus tersebut yaitu lengsernya sosok Anas Urbaningrum dari ketua umum Partai Demokrat.

Lengsernya Anas Urbaningrum dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat mengakibatkan partai berwarna dasar biru tersebut mengalami kekosongan kekuasaan. Oleh karena itu Partai Demokrat harus mengadakan pemilihan untuk menentukan ketua umum baru menggantikan posisi yang ditinggalkan Anas Urbaningrum. Hasil dari pemilihan tersebut menjadikan SBY yang pada saat itu juga masih menjabat sebagai Presiden periode kedua, menjadi ketua umum Partai Demokrat selanjutnya. Setelah SBY menyatakan pensiun dari dunia politik, SBY menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan anak dari SBY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat selanjutnya. Hal ini menjadi salah satu bukti terdapatnya politik dinasti.

2. Ideologi, Visi dan Misi

a) Ideologi

Nasionalis-religius merupakan ideologi yang dipilih dan dianut oleh Partai Demokrat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa secara horizontal partai Demokrat memiliki perhatian untuk mempertahankan NKRI dan rasa cinta tanah air, sedangkan secara vertikal dalam melaksanakan fungsi-

fungsi partai dan penerapan ideologi harus dilandasi dengan semangat keagamaan, sesuai dengan sila pertama dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan yang maha esa. Semangat nasionalisme dalam partai Demokrat diwujudkan dengan keanggotaan partai Demokrat terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan baik dari suku, ras, agama maupun golongan.

Partai Demokrat mempersatukan nasionalisme dengan seluruh agama dalam kerangka yang konstruktif, rukun dan damai. Sesuai dengan ideologi partai yang berideologi Nasionalis-religius, partai Demokrat akan terus aktif berkontribusi dalam *Nation and Character Building* guna untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang religius, bermoral dan beretika, sekaligus mencintai tanah air, bangsa serta negaranya.

b) Visi

Partai Demokrat bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.

c) Misi

1. Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan dalam seluruh proses pembangunan di Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan ke dalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus Proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat dalam upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraan.
2. Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan serta merevisi strategi pembangunan Nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan

penjajah dan merebut Kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi.

3. Memperjuangkan tegaknya persamaan hak serta kewajiban warga Negara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat, otonomi daerah yang luas, serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan.

3. Lambang Partai

Partai Demokrat memiliki lambang yang berupa gambar bintang, bersinar tiga arah dengan warna merah putih pada kedua sisinya dengan latar belakang warna dasar biru tua dan biru laut. Tanda Gambar Partai sebagai berikut:

Picture 1 Lambang Partai Demokrat



Bintang merah putih segitiga bermakna suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari tiga wawasan : 1) Nasionalis-Religius, yaitu yang bermakna wawasan nasionalis serta sekaligus bermoral agama. 2) Humanisme, yaitu bermakna mengakui serta menjunjung tinggi nilai dan martabat perikemanusiaan yang bersifat hakiki dan universal, sebagai bukti bahwa Bangsa Indonesia merupakan bagian yang integral dari masyarakat dunia. 3) Pluralisme, yaitu bermakna mengakui, menghargai serta merangkul berbagai ras, suku bangsa, profesi, jenis kelamin, agama, dan kepercayaan yang menyatu sebagai Bangsa Indonesia.

Warna biru laut yang terdapat di tengah, melambangkan kesejukan penuh kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dalam perjuangan serta upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

Warna biru tua yang terdapat pada bagian atas dan bawah, melambangkan bahwa dalam memperjuangkan serta mengupayakan terwujudnya cita-cita bangsa, bersikap tegas, mantap, percaya diri, dan optimisme yang senantiasa menjadi ciri utama yang harus dianut semua unsur bangsa dan masyarakat.

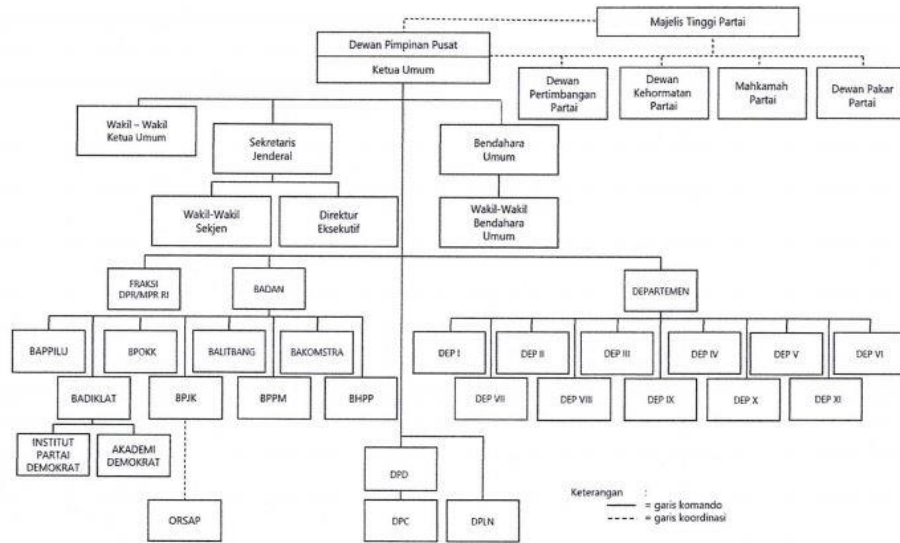
Warna merah putih di setiap sisi bintang dengan latar belakang biru laut, memberi arti warna merah putih yaitu kebangsaan atau nasionalisme dan warna biru yang artinya humanisme ditengah pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia atau internasionalisme serta pluralisme yang merupakan wawasan Partai Demokrat. Pada bagian bawah bintang merah putih bersegitiga terdapat tulisan Partai Demokrat yang berwarna putih.

4. Struktur Kepengurusan Partai Demokrat

Menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, struktur kepengurusan partai Demokrat tingkat pusat terdiri dari Majelis Tinggi Partai, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pertimbangan Partai, Dewan Kehormatan Partai, Mahkamah Partai, serta Dewan Pakar Partai. Dewan pimpinan pusat terdiri dari ketua umum partai yang dipilih melalui kongres partai dan memiliki wakil-wakil, eselon pembantu pimpinan, serta eselon pelaksana untuk membantu ketua umum.

Dalam pelaksanaannya, ketua umum dibantu oleh eselon pembantu pimpinan yang terdiri dari sekretaris jendral, wakil-wakil sekretaris jendral, bendahara umum, wakil-wakil bendahara umum, dan direktur eksekutif. Sedangkan eselon pelaksana terdiri dari dari fraksi DPRD dan MPR partai Demokrat, Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu), Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Badan Doktrin, Pendidikan, dan Pelatihan (Badiklat), Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra), Badan Pembinaan Jaringan Strategis (BPJK), Badan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (BPPM), serta Badan Hukum dan Pengamatan Partai (BHPP). Berikut merupakan garis koordinasi kepengurusan partai Demokrat :

Picture 2 Garis Koordrdinasi Kepengurusan Partai Demokrat



Sumber: demokrat.or.id

B. Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Semarang

1. Struktur Kepengurusan DPC Partai Demokrat Kota Semarang

Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Semarang memiliki kantor yang terletak di kecamatan Banyumanik, kota Semarang, tepatnya di Jl. Setiabudi nomor 234 kota Semarang, Jawa Tengah. Ketua DPC Partai Demokrat kota Semarang berdasarkan AD/ART dipilih setiap 5 (lima) tahun melalui Musyawarah Cabang (Muscab). Berdasarkan hasil Musyawarah Cabang (Muscab) yang dilaksanakan pada 2016 lalu di Semarang, ditetapkan Wahyoe Winarto sebagai ketua DPC Partai Demokrat kota Semarang. Berikut merupakan komposisi struktur organisasi DPC Partai Demokrat kota Semarang periode 2016 – 2021.

Ta-bel 8 Struktur Organisasi DPC PD Kota Semarang Periode 2016-2021

Ketua :	Wahyoe Winarto
Wakil Ketua I	Wiwin Subiono, SH
Wakil Ketua II	Ir. Sumartono
Wakil Ketua III	Suciati, SKM
Sekretaris	Danur Rispriyanto
Wakil Sekretaris I	Drs. Guritno Gunawan, SH
Wakil Sekretaris II	Ismu Puruhito
Wakil Sekretaris III	Tri ANto
Dewan Eksekutif Cabang	Adhito Chandra Y.
Bendahara	Agus Triyanto
Wakil Bendahara I	Uti Indrawati
Wakil Bendahara II	Dra. Cicik Harini, MM
Wakil Bendahara III	Raden Mas Dimas Ariwobo
BADAN PEMENANGAN PEMILU CABANG	

Kepala Badan	Kusdianto Basuki
Wakil Kepala	Rosianis Vivitaniasari
Sekretaris	Suprihatiningsih
BADAN PEMBINAAN ORGANISASI, KADERISASI, DAN KEANGGOTAAN CABANG	
Kepala Badan	Novriadi, SH
Wakil Kepala I	Enny Floriani Filemon
Wakil Kepala II	Djarot Irawadi
Sekretaris	Agung Prayitno

Sumber : DPC Partai Demokrat kota Semarang

Struktur kepengurusan DPC Partai Demokrat kota Semarang dibentuk berdasarkan AD/ART Partai Demokrat. Pengurus DPC Partai Demokrat kota Semarang berjumlah 38 orang, yang terdiri dari 31 laki-laki dan 7 perempuan. Selain itu, dalam kepengurusan ini berasal dari latar pendidikan yang berbeda dengan rincian S3 berjumlah 1 orang, S2 berjumlah 2 orang, S1 berjumlah 17 orang, D3 berjumlah 10 orang, dan SMA/Sederajat berjumlah 8 orang. Walaupun partai Demokrat merupakan partai yang memperhatikan kader-kader muda, namun dalam kepengurusan partai Demokrat kota Semarang masih di dominasi oleh kader-kader yang berusia diatas 40 tahun sebanyak 29 orang dan sisanya 9 orang berusia dibawah 40 tahun.

Jumlah kepengurusan DPC Partai Demokrat kota Semarang pada periode kali ini lebih banyak dibandingkan periode-periode sebelumnya. Pada periode sebelumnya pengurus DPC Partai Demokrat kota Semarang berjumlah 40 orang. Namun pada dua periode sebelumnya, tepatnya pada periode 2011-2016 pengurus DPC partai Demokrat kota Semarang berjumlah 64 orang dan merupakan periode dengan kepengurusan tertinggi. Hal itu dikarenakan pada periode tersebut, partai Demokrat memiliki banyak kader-kader yang bergabung dengan partai Demokrat.

2. Komposisi Fraksi Partai Demokrat Dalam Anggota DPRD Kota Semarang 2019-2024

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Semarang periode 2019-2024 berjumlah 50 orang yang berasal dari 9 partai politik, diantaranya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrasi (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Demokrat. Pada pemilihan

umum 2019, pemilihan DPRD kota Semarang terbagi menjadi 6 daerah pemilihan (dapil), yaitu sebagai berikut :

Tabel 9 Daerah Pemilihan Kota Semarang Pada Pemilu 2019

Nama Daerah Pemilihan	Wilayah Daerah Pemilihan	Jumlah Kursi
Kota Semarang I	Semarang Tengah, Semarang Timur, Semarang Utara	8
Kota Semarang II	Gayamsari, Genuk, Pedurungan	11
Kota Semarang III	Candisari, Tembalang	8
Kota Semarang IV	Banyumanik, Gajahmungkur, Gunungpati	9
Kota Semarang V	Mijen, Ngaliyan, Tugu	7
Kota Semarang VI	Semarang Barat, Semarang Selatan	7
TOTAL		50

Sumber : kpu.jateng.co.id

Dalam pemilihan DPRD kota Semarang, PDIP menjadi partai dengan kader terbanyak yang menduduki kursi DPRD kota Semarang dengan memperoleh kursi sebanyak 19 kursi. Sedangkan partai Demokrat hanya memperoleh 6 kursi, sama dengan partai Gerindra dan PKS yang juga memperoleh 6 kursi DPRD kota Semarang. Berikut merupakan daftar fraksi partai Demokrat yang menduduki kursi DPRD kota Semarang beserta daerah pemilihan dari masing-masing caleg :

Tabel 10 Nama Anggota DPRD Kota Semarang Fraksi Partai Demokrat Periode 2019-2024

No.	Nama Anggota DPRD Kota Semarang	Daerah Pemilihan
1	Swasti Asgawati	Kota Semarang I
2	H.Sugi Hartono	Kota Semarang II
3	Danur Rispriyanto	Kota Semarang III
4	Suciati	Kota Semarang IV
5	Agung Prayitno*	Kota Semarang V
6	Wahyoe Winarto	Kota Semarang VI

Sumber: DPC Partai Demokrat Kota Semarang

*PAW : Pergantian Antar Waktu

Terdapat 6 (enam) kader partai Demokrat yang berhasil menduduki kursi DPRD Kota Semarang. Masing-masing kader partai Demokrat mendapatkan satu kursi di masing-masing daerah pemilihan di kota Semarang. Swasti Asgawati berhasil memperoleh 6.403 suara dari dapil I kota Semarang yang terdiri dari kecamatan Semarang Tengah, Semarang Timur, dan Semarang Utara. Selanjutnya H.Sugi Hartono yang berhasil memperoleh 5.108 suara dari dapil II kota Semarang yang terdiri dari kecamatan Gayamsari, Genuk, dan Pedurungan. Selanjutnya yaitu Danur Rispriyanto yang berhasil memperoleh 4.557 suara dari dapil III kota Semarang yang

terdiri dari kecamatan Candisari dan Tembalang. Selanjutnya yaitu Suciati yang mampu memperoleh 7.835 suara dari dapil IV kota Semarang yang terdiri dari kecamatan Banyumanik, Gajahmungkur, dan Gunungpati. Selanjutnya yaitu Agung Prayitno yang merupakan anggota DPRD kota Semarang yang berstatus sebagai PAW (Pergantian Antar Waktu) dengan perolehan 1.835 suara dari dapil V kota Semarang yang terdiri dari kecamatan Mijen, Ngaliyan dan Tugu. Agung Prayitno menjadi anggota DPRD kota Semarang menggantikan H. Wiwin Subiyono yang memperoleh 6.931 suara dari dapil V kota Semarang. Agung Prayitno merupakan pengganti dari H. Wiwin Subiyono dikarenakan H. Wiwin Subiyono meninggal dunia. Selanjutnya yaitu Wahyoe Winarto atau biasa disapa Liluk yang memperoleh 3.216 suara dari dapil VI kota Semarang yang terdiri dari kecamatan Semarang Barat dan Semarang Selatan. Wahyoe Winarto berstatus sebagai wakil ketua DPRD kota Semarang.

3. Perolehan Suara Partai Demokrat Kota Semarang Dalam Pemilu Legislatif

Partai Demokrat merupakan salah satu peserta dalam pemilu legislatif kota Semarang sejak pemilu 2004. Pemilu 2004 merupakan kali pertama partai Demokrat mengikuti kontestasi pemilihan umum, baik ditingkat nasional berupa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota DPR-RI dan DPD, maupun ditingkat daerah seperti pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kota. Hal itu dikarenakan partai Demokrat merupakan partai yang baru terbentuk tepatnya pada tahun 2001. Pada pemilu 2004, partai Demokrat mencalonkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden Republik Indonesia dan berhasil. Pada saat itu, partai Demokrat kota Semarang juga berhasil memperoleh suara sebanyak 130.845 suara.

Selanjutnya pada pemilu 2009, partai Demokrat kembali mencalonkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden pada periode kedua, dan berhasil. Keberhasilan itu dibarengi dengan kemenangan partai pengusung yaitu partai Demokrat dalam menduduki kursi pemerintahan terbanyak di tingkat nasional. Tidak hanya sampai disitu, bahkan perolehan suara partai Demokrat meningkat di tingkat daerah seperti di kota Semarang yang saat itu memperoleh 196.766 suara. Namun, keberhasilan partai Demokrat tidak dapat terulang lagi pada pemilu selanjutnya, tepatnya pada pemilu 2014. Partai Demokrat yang saat itu sudah tidak bisa mencalonkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden dikarenakan batas maksimal seorang presiden hanya dua periode, mengalami penurunan suara. Di kota

Semarang, yang pada pemilu 2009 memperoleh 196.766 suara merosot pada pemilu 2014 dengan hanya memperoleh 88.946 suara. Hal itu semakin memburuk pada pemilu 2019, dimana partai Demokrat di kota Semarang hanya memperoleh 67.726 suara. Berikut perolehan suara partai Demokrat kota Semarang dalam 4 (empat) periode pemilu :

Tabel 11 Data Perolehan Suara Partai Demokrat Kota Semarang Dalam 4 Periode

Tahun Pemilu	Perolehan Suara Partai Demokrat kota Semarang
2004	130.845
2009	196.766
2014	88.946
2019	67.726

Sumber : [www. Puskapol.ui.ac.id](http://www.Puskapol.ui.ac.id)

Pada tahun 2009 partai demokrat berhasil memperoleh kursi terbanyak di DPRD kota Semarang dengan perolehan suara sebanyak 196.766 suara. Hal tersebut merupakan peningkatan yang dialami partai Demokrat sejak pemilu 2004 hanya memperoleh 130.845 suara. Partai Demokrat saat itu mampu merangkak naik keposisi ke paling atas. Namun, pada pemilihan 2014 partai Demokrat mengalami penurunan perolehan suara DPRD di kota Semarang dengan hanya memperoleh 88.946 suara. Tidak hanya itu, di pemilihan selanjutnya pada tahun 2019 partai Demokrat kembali mengalami penurunan perolehan kursi di DPRD Jawa Tengah dengan hanya memperoleh 67.726 suara. Hal tersebut merupakan penurunan yang dialami partai Demokrat dalam 2 pemilihan di pemilihan 2014 dan pemilihan 2019. Padahal di tahun 2009, partai Demokrat dapat menjadi partai mayoritas yang mendapatkan kursi di DPRD kota Semarang.

BAB IV

PENURUNAN PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT KOTA SEMARANG

Bab IV yang akan disajikan ini, akan menjelaskan mengenai data dan temuan dari analisis yang telah dilaksanakan di lapangan yang berkaitan dengan penurunan perolehan suara partai Demokrat kota Semarang. Data dan temuan yang diperoleh peneliti yang akan disajikan pada bab ini diperoleh dari informan yang telah diwawancarai untuk memperoleh data dan temuan tersebut. Adapun informan yang ditunjuk sebagai narasumber ialah kader dan pengurus partai Demokrat kota Semarang dan yang terlibat dalam pemilu 2019 lalu. Dalam bab ini, akan dijelaskan analisis secara mendalam menggunakan teori *Crisis Legitimation* oleh Jurgen Habermass tentang penyebab penurunan perolehan suara partai Demokrat pada pemilihan legislatif pada tahun 2019.

A. Penurunan Legitimasi Tokoh Pemimpin Partai Demokrat

Indonesia dalam melaksanakan pemilihan umum menerapkan sistem pemilihan proposional terbuka, hal tersebut menjadikan masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam memilih calon legislatif. Tagline *one man one vote* menjadi suara masyarakat menjadi hal yang berharga bagi partai politik untuk mencapai tujuan partai politik dan menduduki jabatan tertinggi di Indonesia.

Dalam memilih, masyarakat akan memilih menggunakan dua orientasi, diantaranya *police problem solving* dan ideologi yang digunakan. Orientasi pertama yaitu *police problem solving* dimana calon legislatif atau partai politik akan menawarkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat melalui program kerja yang ditawarkan ketika melaksanakan kampanye. Hal tersebut menjadi salah satu orientasi dimana masyarakat akan memberikan hak suara kepada calon legislatif ataupun partai politik yang dinilai mampu membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Oleh karena itu, pemilih akan cenderung secara objektif memilih calon legislatif atau partai politik yang menawarkan solusi dan mempunyai kepekaan untuk menghadapi isu permasalahan nasional dalam bentuk program kerja.

Selanjutnya, orientasi kedua yaitu masyarakat yang memberikan hak pilihnya kepada calon legislatif ataupun partai politik berdasarkan ideologi yang dimiliki, dalam hal ini masyarakat melihat aspek-aspek subjektivitas seperti kedekatan nilai, agama, emosi, psikografis, norma, emosi dan budaya. Berdasarkan kedua orientasi

itu, maka calon legislatif ataupun partai politik harus memiliki strategi untuk memperoleh suara, baik perolehan suara caon legislatif maupun perolehan suara partai politik.

Di Indonesia saat ini, eksisten partai politik timbul akibat adanya ketergantungan terhadap sosok sentral. Hal tersebut dapat dilihat dari partai-partai politik yang ada di Indonesia, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki tokoh sentral Megawati Soekarnoputri, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan tokoh sentral Wiranto, Partai Amanat Nasional (PAN) yang memiliki tokoh sentral yaitu Amien Rais, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan tokoh sentral Abdurrahman Wahid, dan Partai Demokrat dengan tokoh sentral Susilo Bambang Yudhoyono (Budiarteti 2021).

Penerimaan partai politik oleh masyarakat dari sisi ideologi, visi misi dan program kerja bukan satu-satunya hal yang berkaitan dengan legitimasi pada partai politik, melainkan juga dipengaruhi oleh citra tokoh yang menjadi kader dalam suatu partai politik. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membentuk citra politik diantaranya melalui kegiatan yang dilakukan, penampilan pribadi di tangan masyarakat, dan penyebaran informasi melalui media. Masalah yang bersifat pribadi, kesuksesan dalam melaksanakan program kerja, dan kegiatan membandingkan kinerja pihak lain selalu dikatkan dengan pencitraan. Pada kampanye pemilihan presiden tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menarik dukungan suara masyarakat dengan menggunakan strategi pencitraan, dan strategi yang digunakan seperti membanggakan latar belakang pendidikan sebagai lulusan terbaik Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) dan selama 27 tahun mengabdikan sebagai perwira, serta pada tahun 2000 meraih pangkat sebagai Jendral Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tokoh pemimpin yang berkhariaisma dan berwibawa merupakan sosok yang ditampilkan oleh SBY sebagai pemimpin dan mengedepankan program-program yang mendukung masyarakat. Adapun program kerja SBY adalah sebagai berikut :

- a) Bidang Kesehatan : Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), pengurangan tingkat gizi buruk balita, penurunan tingkat kematian ibu, pencegahan penyakit menular.
- b) Bidang Kebudayaan : Memberikan intensif kepada kegiatan kesenian dan keilmuan yang berujuan untuk memperbaiki kualitas seni dan budaya serta sebagai pelestarian warisan kebudayaan lokal dan nasional.

- c) Bidang Ekonomi : Menanggulangi kemiskinan masyarakat dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, Program Bantuan Tunai Langsung, Dana BOS, PKH, dan Kredit Usaha Rakyat, serta menciptakan lapangan pekerjaan dengan membangun kawasan-kawasan ekonomi.
- d) Bidang Pendidikan : Menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk program wajib belajar 9 tahun sebesar 20%.
- e) Bidang Hukum dan Demokrasi : Memperbaiki *law enforcement*, pencegahan dan penindakan tanpa tebang pilih terhadap kasus korupsi.
- f) Bidang Lingkungan Hidup : Mencegah bencana alam dengan melakukan reboisasi dan perbaikan aliran sungai, serta melakukan perbaikan terhadap lingkungan yang mengalami kerusakan.
- g) Bidang Ketahanan Pangan : Memberikan informasi yang transparan mengenai harga pasar dari hasil panen yang akurat kepada petani dan nelayan, ketersediaan pupuk, serta peringatan dini terhadap cuaca dan wabah.
- h) Bidang *Good Governance* : Memberikan informasi secara update tentang reformasi birokrasi di lembaga-lembaga pemerintahan dan melakukan pertanggungjawaban terhadap publik, serta memperbaiki remunerasi sehingga lebih memperlihatkan resiko, tanggung jawab, dan beban kerja yang realistis dan berimbang.

Sebagai kepala dan otak bagi partai Demokrat di tingkat Nasional, SBY mempunyai peran yang krusial dalam meningkatkan perolehan suara partai Demokrat pada tahun 2004-2009 dan menghantarkan SBY menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tidak hanya sampai disitu, bahkan di pemilu selanjutnya, SBY kembali menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014 yang merupakan periode kedua bagi SBY.

Perolehan suara yang diperoleh partai Demokrat di tingkat nasional, juga dirasakan di beberapa daerah salah satunya kota Semarang yang bahkan walikota Semarang pada tahun 2000-2005 dan 2005-2010 merupakan kader dari partai Demokrat. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran partai Demokrat yang mendapatkan suara tertinggi di pemilihan umum Presiden. Namun, perolehan suara partai Demokrat mengalami penurunan perolehan suara dalam pemilihan legislatif kota Semarang berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tabel 12 Data Suara dan Kursi Partai Demokrat Dalam 4 Periode di Kota Semarang

Partai Politik	Tahun Pemilu	Perolehan Suara Partai	Perolehan Kursi
Partai Demokrat	2004	130.845	9
	2009	196.766	16
	2014	88.946	9
	2019	67.726	6

Penurunan perolehan suara menurut pengamat politik yang berasal dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, dalam Budiarteti dan Sunarso (2021) disebabkan karena partai Demokrat tidak memiliki sosok figur yang kuat (Budiarteti 2021). Hal itu dikarenakan, partai Demokrat sejak lama menggunakan sosok figur untuk meningkatkan perolehan suara partai. Susilo Bambang Yudhoyono merupakan satu-satunya sosok figur yang mampu untuk meningkatkan perolehan suara partai yang juga merupakan ketua umum partai Demokrat dan sekaligus menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009 & 2009-2014.

Berdasarkan pasal 17 ayat (1) dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 tentang Majelis Tinggi Partai menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Majelis Tinggi Partai Demokrat saat ini. Adapun Majelis Tinggi Partai sesuai AD/ART ialah badan yang bertugas untuk melakukan pengambilan keputusan-keputusan yang strategis partai.

Berdasarkan hasil survei pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Charta Politika melalui Direktorat Riset Charta Politika Indonesia Muslimin menyimpulkan bahwa hubungan antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan partai Demokrat masih sangat kuat. Hal itu dikarenakan partai Demokrat memiliki elektabilitas 5,2 persen dan 11,2 persen responden memilih partai Demokrat karena puas dengan kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Oleh karena itu, Susilo Bambang Yudhoyono masih menjadi sosok yang kuat untuk meningkatkan perolehan suara partai Demokrat. Hal tersebut serupa dengan yang disampaikan oleh ketua DPC Partai Demokrat, Wahyu Liluk Winarto :

“Pak SBY memang menjadi iconic dari partai Demokrat, dengan kata lain partai Demokrat adalah SBY dan SBY adalah partai Demokrat, oleh karena itu, kita (kader) masih selalu melibatkan beliau dalam setiap keputusan dan selalu manut beliau” (Wawancara, Wahyu Liluk Winarto, Ketua DPC, 20 Februari 2023)

Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Semarang mengatakan bahwa sifat paternalistik masih dimiliki oleh partai Demokrat. Paternalistik

merupakan sifat menjunjung tinggi keberadaan *founder father* atau pencipta atau pencetus pertama yang dalam hal partai Demokrat dimiliki oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan kata lain, partai Demokrat dalam menjalankan atau menentukan kebijakan masih tergantung dari keputusan Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu dikonfirmasi oleh Dewan Eksekutif (DE) DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, Ali Mas'adi :

“Memang benar mas, pak SBY itu kunci dari partai Demokrat, toh partai Demokrat dibentuk sebagai kendaraan pak SBY untuk naik Presiden setelah keluar dari kabinet bu Mega” (Wawancara, Ali Mas'adi, Ketua DPD, 3 Maret 2023)

Kekuatan yang mengakar yang dimiliki oleh Susilo Bambang Yudhoyono ialah kekuatan sosial yang sanggup memberikan desakan ataupun dorongan yang efektif dan berpengaruh bagi orang lain. Hal tersebut serupa dengan yang disampaikan oleh pengurus DPC Partai Demokrat kota Semarang yang mengatakan bahwasannya dalam menentukan kebijakan partai Demokrat, harus meminta saran dan masukan serta pertimbangan dari Susilo Bambang Yudhoyono karena hal tersebut merupakan kewajiban dari Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dimilikinya.

Oleh karena itu, keberadaan Susilo Bambang Yudhoyono dalam partai Demokrat merupakan figur yang mampu meningkatkan perolehan suara partai Demokrat. Berakhirnya jabatan ketua umum partai Demokrat yang dimiliki oleh Susilo Bambang Yudhoyono menjadi penyebab suara partai Demokrat dalam pemilihan umum 2019 baik ditingkat nasional maupun daerah mengalami penurunan. Hal tersebut juga berdampak dari turunnya perolehan suara partai Demokrat kota Semarang pada pemilihan legislatif tahun 2019.

B. Penurunan Legitimasi Kader Partai Demokrat

Pemberitaan terhadap partai politik dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan dan masa depan partai tersebut. Citra partai politik terbentuk dari pemberitaan-pemberitaan yang disebar luaskan dalam masyarakat. Apabila pemberitaan partai politik baik maka akan berdampak baik dan menumbuhkan citra positif bagi masyarakat, begitu juga apabila partai politik diberitakan buruk maka akan menimbulkan citra negatif bagi partai tersebut. Proses-proses pemberitaan yang dipersiapkan dan diberikan ke masyarakat berkaitan dengan realitas yang terjadi dan dalam presentasi media, baik media massa, media cetak, maupun media online.

Dengan berkembangnya zaman dan pesatnya perkembangan pemberitaan, media massa mampu membangun opini publik dari suatu organisasi yang diberitakan. Oleh

karena itu, citra yang dimiliki oleh suatu organisasi ataupun partai politik ditentukan oleh pemberitaan yang diberitakan oleh media. Sehingga organisasi atau partai politik yang diberitakan akan merasa citra yang diberitakan positif atau negatif berdasarkan pemberitaan yang dikeluarkan media dan dalam menyampaikan objek pemberitaan. Terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya krisis legitimasi bagi partai Demokrat, yaitu kasus korupsi proyek Hambalang dan dinasti politik yang terjadi di kota Semarang.

1. Kasus Korupsi Kader Partai Demokrat

Penurunan perolehan suara partai Demokrat di Kota Semarang merupakan dampak dari isu-isu yang terjadi di nasional, salah satunya kasus korupsi dalam proyek Hambalang yang melibatkan kader partai Demokrat yang berdampak tercorengnya *image* kader partai Demokrat ditingkat daerah termasuk Kota Semarang. Isu merupakan suatu pokok permasalahan yang dibicarakan, diperdebatkan, dan atau diputuskan, yang dampak dari munculnya isu politik yang menyeret kader partai Demokrat memiliki pengaruh terhadap penentuan sikap dan perilaku pemilih. Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh salah seorang informan yang merupakan kader Partai Demokrat tingkat daerah, Adian :

“Isu-isu kan keterlibatan kader-kader partai Demokrat terhadap kasus korupsi di tingkat nasional memang menjadi salah satu alasan mengapa suara partai demokrat baik di nasional maupun di daerah mengalami penurunan” (Wawancara, Adian, Anggota Bakomstra PD Jateng, 22 Februari 2023)

Keterlibatan kader partai politik di pusat yang merupakan elit politik nasional dalam kasus korupsi menjadikan masyarakat melakukan *labeling* terhadap partai Demokrat bahwa partai Demokrat merupakan partai yang melakukan korupsi pada mega proyek Hambalang, hal-hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pemilih ataupun masyarakat sudah memiliki pengetahuan yang memadai dan ditambah dengan perkembangan teknologi dalam penyampaian informasi yang semakin cepat dapat diakses oleh siapa saja. Hal tersebut dikonfirmasi oleh ketua DPC Partai Demokrat kota Semarang dan Dewan Eksekutif DPD Partai Demokrat Jawa Tengah.

“Memang, itu menjadi faktor utama sebenarnya, tapi kita tidak akan mencoba menutupi tapi kita akan move on dan berusaha mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat kepada kita”

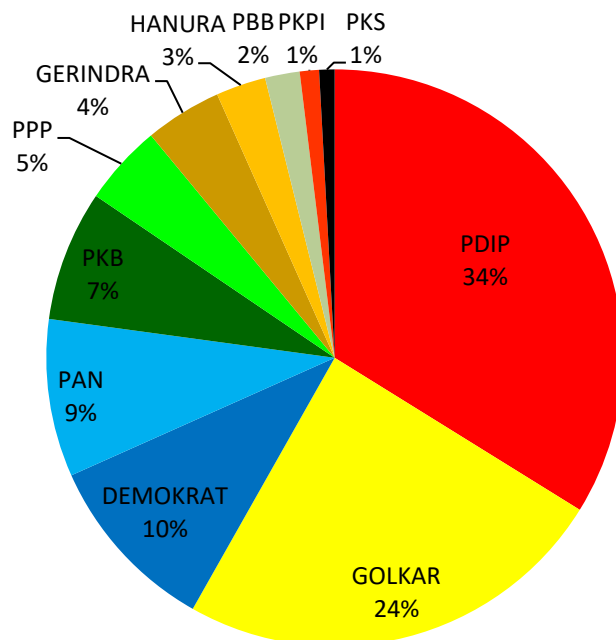
(Wawancara, Wahyoe Winarto, Ketua DPC PD Semarang, 20 Februari).

Hal tersebut dikonfirmasi oleh ketua DPD partai Demokrat Jawa Tengah, Ali Mas'adi

“Kasus korupsi Hambalang sebenarnya sudah clear, yang bersangkutan juga mendapatkan hukuman, tapi ya memang benar, kasus itu jadi faktor penyebab penurunan suara kita, ditambah saat ini era buzzer makin meningkat, jadi kasus tersebut selalu dimunculkan, akibatnya ya kita turun” (Wawancara, Ali Mas'adi, DE PD Jawa Tengah, 3 Maret 2023).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jumlah kasus korupsi yang melibatkan elit partai politik yaitu kader partai PDIP berjumlah 157 orang, selanjutnya diposisi kedua yaitu kader partai Golkar yang berjumlah 113 orang, diposisi ketiga terdapat partai Demokrat dengan kader yang terlibat kasus korupsi sebanyak 47 orang sejak tahun 2002 hingga tahun 2014, hal tersebut dapat dilihat dalam diagram berikut ini :

Picture 3 Persentase Partai Politik Yang Terlibat Korupsi



Kasus korupsi terbesar yang melibatkan beberapa kader partai Demokrat yaitu proyek Hambalang yang merupakan proyek inisiasi tahun 2003-2004 oleh Direktorat Jendral Olahraga Departemen Pendidikan Nasional dalam rangka persiapan pembinaan atlit nasional bertaraf internasional. Dalam kasus Hambalang ini, Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor) dilakukan secara bertahap dan terstruktur, mulai dari proses penyusunan anggaran, lelang, bahkan sampai kegiatan pengadaan. Kasus Hambalang yang rencana awalnya akan digunakan sebagai Proyek Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 436,66 Miliar. Berikut beberapa pejabat negara yang terlibat dalam kasus korupsi Hambalang, yaitu :

- 1) Anggota DPR Periode 2009-2014, Muhammad Nazaruddin, dan merupakan Bendahara Umum Partai Demokrat pada tahun 2010. Nazaruddin terbukti menerima imbalan dengan total Rp 4,6 Miliar yang berasal dari PT Duta Graha Indah (DGI) sebagai pemenang proyek Hambalang.
- 2) Anggota DPR Periode 2004-2009, Angelina Sondakh, dan merupakan kader partai Demokrat. Angelina terbukti menerima uang sebesar Rp 2,5 Miliar dari PT Group Permai yang merupakan perusahaan milik Muhammad Nazaruddin.
- 3) Menteri Pemuda dan Olahraga Periode 2009-2014, Andi Mallarangeng, dan merupakan kader partai Demokrat dan Juru Bicara Presiden SBY pada tahun 2004-2009. Andi terbukti bersalah dalam kasus Hambalang dikarenakan menerima uang sebesar Rp 2 Miliar, dan tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Menpora untuk menyampaikan permohonan kontrak tahunan kepada Menteri Keuangan.
- 4) Anggota DPR Periode 2009-2014, Anas Urbaningrum, dan merupakan Ketua Umum Partai Demokrat ke-3. Anas terbukti menerima dana sebesar Rp 2,21 Miliar dari kasus Hambalang dan dana tersebut disangkutkan dengan PT Wijaya Karya dan PT Adhi Karya.

Kasus Hambalang yang terjadi dan melibatkan beberapa kader partai Demokrat menjadikan kasus Hambalang ini melekat sebagai kasus korupsi yang dilakukan oleh partai Demokrat. Hal itu dikarenakan pada saat kejadian partai Demokrat merupakan partai yang menjadi pemenang pemilu, dan

bahkan presiden Indonesia saat itu berasal dari partai Demokrat yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, keterlibatan mantan Ketua Umum Partai Demokrat dan Bendahara Umum Partai Demokrat menjadikan kasus tersebut identik dengan partai yang memiliki warna dasar biru muda tersebut.

“karena partai Demokrat terlibat dalam kasus tersebut (hambalang) jadi banyak pendukung yang kecewa, padahal slogan partai kan partai anti korupsi, nyatanya malah yang korupsinya ketua umum partai itu sendiri, ditambah pada saat itu partai demokrat masih menjadi partai yang berkuasa, pak SBY kan juga masih menjabat sebagai presiden pada saat itu” (Wawancara, Adian, Anggota Bakomstra PD Jateng, 22 Februari 2023)

Selain kasus Hambalang yang melibatkan tokoh-tokoh nasional partai Demokrat, kasus tindak pidana korupsi juga dilakukan oleh kader partai Demokrat tingkat daerah, yaitu kasus suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang yang dilakukan oleh Sumartono dan merupakan kader partai Demokrat sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah pada tahun 2012. Kondisi tersebut yang menjadi salah satu sebab turunnya kredibilitas partai Demokrat bagi masyarakat kota Semarang. Hal tersebut mengakibatkan merosotnya elektabilitas partai Demokrat dan mengalami penurunan perolehan suara.

Oleh karena hal tersebut, masyarakat yang memiliki hak suara tidak memberikan legitimasi kepada partai Demokrat dikarenakan terjadinya krisis kepercayaan. Walaupun demikian, kader Partai Demokrat daerah seperti Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Semarang tetap menjalankan program-program dari Partai Demokrat yang dijalankan oleh SBY saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

2. Dinasti Politik Partai Demokrat Kota Semarang

Pemilihan umum merupakan salah satu ajang demokratis yang digunakan oleh calon legislatif untuk menduduki kursi pemerintahan. Dalam usaha untuk mendapatkan hal tersebut harus dilakukan secara maksimal melalui kampanye yang masif dan fenomenal. Strategi-strategi propaganda maupun agitasi digunakan sebagai senjata guna memperoleh suara yang maksimal dengan cara formal melalui kegiatan kampanye dan menggunakan

isu-isu yang dibalut dengan politik identitas dan isu dinasti politik (Ukhra 2022).

Dinasti politik merupakan sistem reproduksi kepemimpinan yang mengandalkan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan dengan elit-elit tertentu. Beberapa elit politik di tingkat daerah perlahan-lahan menunjukkan upaya dinasti politik melalui reproduksi kepemimpinan baik dalam batang tubuh partai Demokrat maupun secara langsung sebagai pejabat publik (Gunanto 2020). Dinasti politik terjadi karena salah satu elit politik ingin mengikutsertakan keluarganya dalam kekuasaan politik. Berikut merupakan keluarga presiden Republik Indonesia yang menjadi pejabat publik.

Tabel 13 Daftar Keluarga Presiden Yang Terjun Ke Dunia Politik

No.	Presiden	Nama Keluarga	Hubungan Kekeluargaan	Jabatan
1.	Ir. Soekarno	Megawati Soekarnoputri	Anak	Presiden RI ke-5 dan Ketua umum PDIP
		Puan Maharani	Cucu	Ketua DPR-RI 2019-2024
2.	Soeharto	Siti Hardijanti Rukmana	Anak	Menteri Sosial 1998
		Siti Hediati Hariyadi	Anak	Anggota DPR-RI 2014-2019
		Hutomo Mandala Putra	Anak	Anggota DPR-RI 1992-1998
3.	Abdurrahman Wahid	Yenny Wahid	Anak	Stafsus Presiden
4.	Megawati Soekarnoputri	Alm. Taufik Kiemas	Suami	MPR-RI Tahun 2009-2014
		Puan Maharani	Anak	Ketua DPR-RI 2019-2024
5.	Susilo Bambang Yudhoyono	Edhie Baskoro	Anak	Anggota DPR-RI 2009-2014
		Agus Yudhoyono	Anak	Ketua umum partai Demokrat 2020-2025
6.	Joko Widodo	Gibran R. Raka	Anak	Walikota Solo 2021-2026
		Bobby Nasution	Menantu	Walikota Medan 2021-2026

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa hampir seluruh mantan presiden dan presiden Republik Indonesia saat ini secara tidak langsung

menerapkan prinsip dinasti politik. Tidak hanya mengorbitkan anak-anak mereka untuk berada dalam lembaga pemerintahan, namun beberapa juga mengikutsertakan anggota keluarga lainnya. Tabel tersebut hanya berdasarkan presiden, namun dalam realitanya masih banyak tokoh elit politik di Indonesia yang menerapkan politik dinasti baik dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup daerah.

Susilo Bambang Yudhoyono secara tidak langsung juga mengimplementasikan dinasti politik, dengan mengorbitkan kedua anaknya untuk terjun ke dunia politik dan berada dalam lembaga pemerintahan. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono merupakan anak dari Susilo Bambang Yudhoyono mantan presiden RI. Keduanya saat ini ikut terjun kedalam dunia politik di Indonesia dengan rincian AHY sebagai ketua umum partai Demokrat menggantikan SBY yang saat ini menjabat sebagai Majelis Agung partai Demokrat. Selanjutnya yaitu Edhie Baskoro Yudhoyono yang akrab disapa Ibas saat ini merupakan anggota Komisi VI DPR RI periode 2019-2024 yang membidangi perdagangan, industri, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Badan Usaha Milik Negara, investasi dan standarisasi. Tidak hanya anaknya, namun beberapa anggota keluarga dan kerabat SBY juga ikut terjun kedalam dunia politik Indonesia. Politik dinasti yang semacam ini dinilai mampu mengikis legitimasi masyarakat terhadap partai politik, sebagaimana disampaikan oleh Kader Partai Demokrat, Susyanto

“Sebenarnya hal-hal seperti itu udah lumrah terjadi, sejak dulu juga gitu, tapi kan sekarang masyarakat sudah cerdas-cerdas, gak bisa mainan seperti itu dilakukan lagi, udah bukan jamannya lagi, partai Demokrat di Semarang turun ya penyebab salah satunya itu, bukan yang keluarga pak SBY loh, tapi di Semarang itu dinastinya pak sukawi.” (Wawancara, Kader PD, Susyanto, 11 Maret 2023).

Berdasarkan yang disampaikan narasumber, salah satu penyebab penurunan legitimasi masyarakat terhadap partai Demokrat adalah usaha yang dilakukan Sukawi Sutarip untuk membentuk dinasti di kota Semarang dan Jawa Tengah. Terdapat beberapa anggota keluarga dan kerabat Sukawi Sutarip yang ikut dalam pemilihan legislatif di Jawa Tengah pada tahun 2014 dan 2019. Meskipun lebih banyak yang ikut dalam pemilihan legislatif pada

tahun 2014, namun hal itu masih berdampak terhadap pemilihan legislatif 2019 di Jawa Tengah. Berikut merupakan daftar calon keluarga Sukawi Sutarip sebagai mantan walikota 2 (dua) periode kota Semarang yang terjun ke dunia politik di Jawa Tengah.

Pada pemilu 2014 lalu, Sukawi Sutarip yang saat itu menjabat sebagai ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah mencalonkan beberapa anggota keluarga dan kerabatnya melalui partai Demokrat. Bahkan, mantan walikota Semarang tersebut juga ikut mencalonkan diri sebagai calon legislatif dalam pemilu 2014 di Jawa Tengah. Selain Sukawi Sutarip, berikut beberapa anggota keluarga yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada pemilu 2014 :

Tabel 14 Daftar Keluarga Sukawi Sutarip Sebagai Caleg di Jawa Tengah

No.	Nama	Hubungan	Jabatan
1	Sinto Sukawi	Istri	Caleg DPR-RI dapil Jateng II
2	Kawi Suharli	Saudara	Caleg DPRD Prov dapil Jateng II
3	Sutarip Tulis Widodo	Saudara	Caleg DPR-RI dapil Jateng X
4	Sri Ratnawati	Ipar	Caleg DPR-RI dapil Jateng IX
5	Kartina Sukawati	Anak	Caleg DPRD Prov dapil III
6	Joni Kurnianto	Menantu	Caleg DPRD Kab Pati dapil I
7	AS Sukawi Wijaya	Anak	Caleg DPRD Prov dapil I
8	Swasti Asgawati	Menantu	Caleg DPRD Kota Semarang dapil II

Sumber : Kpu.go.id (diolah)

Pada Pemilihan umum 2014 di Jawa Tengah, partai Demokrat Jawa Tengah yang saat itu dipimpin oleh Sukawi Sutarip, digunakan sebagai kendaraan untuk memperoleh kekuasaan di pemerintahan oleh keluarga dan kerabat Sukawi Sutarip. Pada pemilu 2014 juga, Sukawi Sutarip melalui partai Demokrat juga menjadi calon legislatif DPR-RI dari dapil IX Jateng dengan nomor urut 1. Selain Sukawi Sutarip, istrinya Sinto Sukawi juga mencalonkan diri sebagai caleg DPR-RI dapil II Jateng melalui partai Demokrat. Kawi Suharli dan Sutarip Tulis Widodo yang merupakan saudar Sukawi Sutarip juga menjadi caleg pada pemilu 2014 Jawa Tengah melalui partai Demokrat. Istri dari Sutarip Tulis Widodo, Sri Ratnawati yang merupakan ipar Sukawi Sutarip juga mencalonkan diri sebagai caleg DPR-RI dari dapil IX Jateng melalui partai Demokrat. Berarti total ada 5 (lima)

anggota keluarga Sukawi Sutarip yang mencalonkan diri sebagai caleg melalui partai Demokrat termasuk Sukawi Sutarip.

Tidak hanya kelima orang tersebut, kedua anak dan menantunya Sukawi Sutarip juga mencalonkan diri sebagai caleg pada pemilu 2014 Jateng, diantaranya Kartina Sukawati sebagai caleg DPRD provinsi Jawa Tengah dapil III dan suaminya Joni Kurnianto sebagai caleg DPRD kabupaten Pati dapil I. AS Sukawijaya juga mencalonkan diri sebagai caleg DPRD provinsi Jawa Tengah dapil I. Tidak hanya itu, Swasti Asgawati yang merupakan suami AS Sukawijaya dan menantu Sukawi Sutarip juga mencalonkan diri sebagai caleg DPRD kota Semarang dapil II. Seluruh anggota keluarga Sukawi Sutarip yang menjadi caleg pada pemilu 2014 Jawa Tengah dicalonkan melalui partai Demokrat.

Meskipun pada pemilu 2019 tidak keseluruhan nama-nama tersebut mencalonkan diri lagi, kedua anak dan menantunya Sukawi Sutarip kembali mencalonkan diri dan berhasil menduduki jabatannya masing-masing, diantaranya AS. Sukawijaya sebagai anggota DPR-RI dari Jateng I dan istrinya Swasti Asgawati sebagai anggota DPRD kota Semarang dapil I. Selanjutnya Kartina Sukawati yang merupakan anak pertama Sukawi Sutarip sebagai anggota DPRD provinsi Jawa Tengah dapil 4 dan suaminya Joni Kurnianto menjabat sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat kabupaten Pati.

Masyarakat yang mulai melek politik menyadari bahwa terdapat upaya dari Sukawi Sutarip untuk membentuk dinasti politik di Jawa Tengah. Oleh karena itu, terjadi penurunan legitimasi masyarakat terhadap partai Demokrat Jawa Tengah karena upaya pembentukan dinasti politik oleh Sukawi Sutarip. Penurunan legitimasi masyarakat Jawa Tengah menjadi salah satu faktor penurunan perolehan suara partai Demokrat terkhusus pada kota Semarang dalam pemilu legislatif tahun 2019.

BAB V

HUBUNGAN PELEMBAGAAN PARTAI TERHADAP PENURUNAN PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT KOTA SEMARANG

Kajian yang mendalam mengenai rumusan masalah kedua dan menjelaskan mengenai data dan temuan dari analisis yang telah dilaksanakan di lapangan yang berkaitan dengan pengaruh teori pelebagaan partai dengan penurunan perolehan suara partai Demokrat kota Semarang. Data dan temuan yang diperoleh peneliti yang akan disajikan pada bab ini diperoleh dari informan yang telah diwawancarai untuk memperoleh data dan temuan tersebut. Adapun informan yang ditunjuk sebagai narasumber ialah kader dan pengurus partai Demokrat kota Semarang dan yang terlibat dalam pemilu 2019 lalu. Dalam bab ini, akan dijelaskan analisis secara mendalam menggunakan teori pelebagaan partai oleh Basedau dan Strohh tentang pengaruh pelebagaan partai terhadap penurunan perolehan suara partai Demokrat pada pemilihan legislatif pada tahun 2019.

Menurut Basedau dan Strohh, bahwa pelebagaan partai merupakan suatu proses yang dialami oleh suatu partai politik yang mengikuti kontestasi pemilihan umum dan mengalami peningkatan stabilitas serta nilai-nilai organisasi. Peningkatan nilai-nilai diartikan oleh sebagian orang yang relevan dalam hal ini anggota partai dan pemilih yang meyakini bahwa partai politik dalam demokrasi tidak bisa dilupakan (Syafidho 2022). Dalam teori pelebagaan partai oleh Basedau dan Strohh membagi pelebagaan menjadi 4 faktor yang dibagi menjadi dua kategori yaitu Kekuatan Organisasi dan Koherensi yang merupakan kategori internal dari partai politik tersebut, serta Akar di Masyarakat dan Otonomi merupakan kategori eksternal dari partai politik tersebut. Namun, dalam penelitian ini, hanya menganalisis hubungan antara Kekuatan Organisasi dan koherensi yang termasuk kedalam internal pelebagaan politik dengan penurunan perolehan suara partai Demokrat pada pemilu 2019 di kota Semarang. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara kekuatan organisasi dan koherensi dengan penurunan perolehan suara partai Demokrat pada pemilu 2019 di kota Semarang, maka penulis akan menjabarkan hasil analisis berdasarkan pada teori pelebagaan partai oleh Basedau dan strohh sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya.

A. Kekuatan Organisasi Partai Demokrat kota Semarang

Kekuatan organisasi partai dalam pelebagaan partai politik mengarah terhadap sejauh mana kader partai hadir secara berkelanjutan dalam semua level

administrasi dan bertindak sesuai ideologi partai, serta turut aktif dalam kegiatan-kegiatan partai politik baik dalam masa pemilu seperti kampanye maupun kegiatan diluar pemilu. Dengan kata lain, kekuatan organisasi dipengaruhi oleh aktor-aktor ataupun elit yang terlibat di dalam suatu partai politik. Oleh karena itu, kekuatan organisasi partai politik bersumber dari citra ataupun kharisma yang dimiliki oleh suatu partai politik.

Kader atau elit partai politik yang dijadikan sebagai sumber utama kekuatan partai politik tidak hanya pada masa sekarang, jauh sebelum itu kader atau elit partai politik sudah dijadikan sebagai sumber utama kekuatan partai politik. Partai Sarekat Islam yang menjadikan Hadji Oemar Said Tjokroaminoto sebagai sumber kekuatan utama partai dengan menggunakan peran dan pengaruhnya. Tjokroaminoto sebagai *founding father* sekaligus sebagai pemimpin Partai Sarekat Islam yang kemudian berkembang menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia hingga akhir hayatnya. Pada kepemimpinan Tjokroaminoto, Partai Sarekat Islam merupakan partai politik yang populer dimasyarakat dan memiliki jutaan pendukung terutama dari kalangan kelompok Islam. Namun, wafatnya Tjokroaminoto sebagai pemimpin Partai Sarekat Islam menjadi awal menurunnya perolehan suara Partai Sarekat Islam dalam pemilu. Hal tersebut dikarenakan hilangnya dukungan masyarakat yang diberikan kepada Partai Sarekat Islam dikarenakan ketiadaan sosok Tjokroaminoto (Budiatri et al. 2018).

Pada masa reformasi di Indonesia saat ini, beberapa partai politik juga menjadikan kader atau elit partai sebagai sumber kekuatan utama partai tersebut. Bahkan beberapa diantara partai besar di era reformasi menjadi lekat dengan identitas dari personalia kader atau elit partai politik tertentu. Kader atau elit partai politik tersebut mengisi jabatan-jabatan krusial dalam kepengurusan suatu partai dalam kurun waktu yang cukup lama. Berikut akan disajikan tabel sebagai gambaran yang lebih jelas mengenai partai-partai yang menggunakan personalia kader atau elit partai di era reformasi sebagai kekuatan utama partai politik :

Tabel 15 Tokoh Elit dan Jabatan Dalam Partai Politik

No.	Partai Politik	Tokoh Partai Politik	Peran dalam Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Abdurrahman Wahid	Sebagai pendiri PKB pada tahun 1998 dan ketua Dewan Syuro periode 2000-2009

2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Megawati Soekarnoputri	Sebagai pendiri PDIP pada tahun 1973 dan ketua umum partai pada tahun 1999-sekarang
3.	Partai Amanat Nasional (PAN)	Amien Rais	Sebagai pendiri PAN pada tahun 1998, ketua umum partai periode 1998-2005, ketua umum Majelis Pertimbangan Pusat pada tahun 2005-2015, dan ketua Dewan Kehormatan Partai pada tahun 2015-2020
4.	Partai Demokrat	Susilo Bambang Yudhoyono	Sebagai pendiri partai tahun 2001, ketua umum partai tahun 2013-2020 dan sebagai Majelis Tinggi Partai Demokrat pada tahun 2020-sekarang
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Prabowo Subianto	Sebagai pendiri partai Gerindra pada tahun 2008 dan sebagai Ketua Dewan Pembina pada tahun 2008-sekarang
6.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Wiranto	Sebagai pendiri partai Hanura pada tahun 2006 dan sebagai ketua umum partai pada tahun 2006-2016
7.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Surya Paloh	Sebagai pendiri partai pada tahun 2011, Ketua Majelis Tinggi Partai pada tahun 2011-2013, dan Ketua Umum Partai pada tahun 2013-sekarang

Partai-partai seperti disebutkan dalam tabel di atas, merupakan beberapa partai yang menggunakan personal kader sebagai kekuatan utama partai. Partai-partai tersebut menjadikan *founding father* mereka sebagai sosok yang menjadi kekuatan utama di dalam partai. Bahkan, diantara partai-partai tersebut terdapat partai yang sangat identik dengan sosok elit partai tersebut, seperti saat pelaksanaan kampanya,

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak jarang memunculkan jargon-jargon seperti “Partai Ibu Mega” untuk memberitahukan kepada publik, atau mempertegas kepada masyarakat kalau Megawati Soekarnoputri merupakan elit dari partai tersebut. Tidak hanya PDIP, partai Demokrat yang identik dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pelaksanaan kampanye kerap menggunakan jargon seperti “Partai Demokrat, Partainya SBY” dengan tujuan yang sama yaitu memberitahukan kepada publik dan mempertegas bahwa Susilo Bambang Yudhoyono merupakan elit dari partai tersebut. Identitas kedua elit tersebut dengan partai politiknya masing-masing sudah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sejak berdiri hingga saat ini.

Kelima partai selain PDIP dan Partai Demokrat, juga menjadikan elit partai politik mereka sebagai kekuatan utama dalam partai politik tersebut. Masyarakat dapat mengenali partai politik dengan menyebutkan elit dari partai politik tersebut, seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Amin Rais, Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) dengan Surya Paloh, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan Prabowo Subianto, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan Wiranto, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Walaupun demikian, terdapat beberapa pengecualian, apabila partai tersebut mengalami perpecahan atau dualisme, seperti yang dialami oleh PKB pada tahun 2008 yang menghasilkan argumen-argumen dari pendukung Gus Dur dan anggota keluarga Gus Dur mengatakan bahwa PKB saat ini bukanlah PKB Gus Dur (Soim 2018).

Personalia yang dimiliki oleh kader-kader atau elit partai politik tersebut, tidak hanya digunakan sebagai identitas agar masyarakat lebih mengenal partai politik, namun kader-kader atau elit partai politik tersebut menduduki posisi yang sentral dan krusial. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan atau arah dan tujuan partai mendapatkan arahan dan ditentukan oleh personalia kader atau elit partai politik tersebut. Dengan kata lain, sebagai *icon* dari partai Demokrat, SBY juga merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam batang tubuh partai Demokrat sebagai Majelis Tinggi Partai Demokrat pada tahun 2020 hingga sekarang.

Kekuatan organisasi sebagaimana dijelaskan oleh Basedau dan Strooh, memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan untuk menambah spirit perjuangan bagi setiap individu dalam batang tubuh partai. Selain itu, Kekuatan organisasi partai politik juga dipengaruhi oleh kader-kader dan anggota yang dimiliki oleh partai tersebut, apabila didalamnya terdapat kader yang berkualitas, maka dapat

meningkatkan kekuatan organisasi yang dimiliki oleh partai tersebut. Atas dasar tersebut partai Demokrat menggunakan figur SBY sebagai sumber utama kekuatan mereka dalam pemilihan umum untuk meningkatkan perolehan suara partai Demokrat baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Namun, pada pemilu legislatif 2019 di kota Semarang, partai Demokrat mengalami penurunan perolehan suara yang berimbang berkurangnya jatah kursi tingkat kota untuk partai Demokrat. Menurut hasil dan analisis serta temuan peneliti yang dilakukan dilapangan, peneliti menemukan 2 (dua) faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Adapun faktor kekuatan organisasi yang dimiliki oleh partai Demokrat kota Semarang yang menjadi penyebab menurunnya perolehan suara partai Demokrat dalam pemilihan legislatif 2019 kota Semarang, yaitu :

1. Peralihan Kekuasaan Kekuatan Partai Demokrat

Partai Demokrat termasuk salah satu partai yang menggunakan kekuatan elit atau personalia kader sebagai sumber kekuatan partai Demokrat. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai *founding father* dan merupakan sumber kekuatan yang dimiliki oleh partai Demokrat.

Selain sebagai *icon* partai Demokrat dan elit yang berpengaruh dalam partai, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadikan partai Demokrat sebagai kendaraan politik untuk dapat mengikuti pesta demokrasi sebagai calon presiden. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya SBY dalam partai Politik sangat krusial, hal tersebut dapat dilihat pada pemilihan umum pada tahun 2004 dan 2009 dimana SBY mampu memenangkan pertarungan dalam memperebutkan kursi kepresidenan ke-5 Republik Indonesia. Bahkan puncaknya pada tahun 2009, partai Demokrat menjadi partai pemenang pemilu dan mendapatkan perolehan suara dan kursi tertinggi.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menjadikan partai Demokrat sebagai sarana bagi anggota keluarganya untuk ikut berpartisipasi dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Partai Demokrat melakukan kegiatan sebagaimana partai politik lain juga melakukan hal yang sama, yaitu melibatkan anak-anak personalia elit partai ke dalam kepengurusan partai dan sekaligus sebagai wakil di parlemen atau pemegang kekuasaan tertinggi di lembaga eksekutif. Tidak hanya SBY dan partai Demokrat, namun beberapa partai juga melakukan hal

tersebut. Walaupun demikian, partai Demokrat menjadi partai politik tertinggi yang melibatkan anggota keluarga dan kerabat menjadi kader partai Demokrat. Tercatat, sebanyak 16 anggota keluarga SBY yang menduduki kursi pemerintahan baik sebagai pemerintah daerah maupun sebagai perwakilan rakyat.

Pada pemilihan umum serentak tahun 2019, isu mengenai pemindahan kekuasaan dari SBY ke anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) perlahan mulai muncul, namun tidak terlalu timbul karena tertutup oleh isu-isu lainnya. Sebagaimana pernyataan dari pengamat politik, RN (32) mengatakan :

“Walaupun belum fix, tapi sepertinya prediksi kita bahwasanya pak SBY akan menyerahkan partai Demokrat kepada anaknya, AHY, dan itu saya rasa akan membuat kecewa beberapa pendukungnya” (Wawancara, RN, Pengamat Politik, 28 Februari 2023)

Walaupun isu tersebut belum terlalu berkembang, namun sebagian masyarakat dan pengamat politik menganggap bahwa hal tersebut akan terjadi, dan dapat menciderai demokrasi, apabila seorang ketua umum partai memberikan jabatan kepada anaknya untuk melanjutkan menjadi ketua umum partai. Salah seorang warga yang menyadari isu tersebut, menyatakan hal tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat yang selama ini sudah tercipta.

“Keliatannya pak SBY terlalu memaksa anaknya untuk menjadi pemimpin, harusnya sih bisa bertahap, mulai dari walikota, gubernur dan seterusnya, tidak ujug-ujug jadi presiden atau wakil presiden” (Wawancara, Sutiasih, Masyarakat Kota Semarang, 02 Maret 2023)

Selain menyeruaknya isu-isu tersebut, pada pemilu serentak 2019, SBY sebagai kekuatan utama dari partai Demokrat kurang maksimal dalam menjadi ketua umum partai Demokrat. Hal tersebut dikarenakan SBY memilih untuk fokus menemani dan merawat Ani Yudhoyono yang saat itu di diagnosa menderita kanker dan dirawat di Singapura. Oleh karena itu, SBY sebagai sosok utama dan figur krusial dalam partai Demokrat untuk menghadapi pemilu serentak 2019

beberapa kali harus absen dalam mengikuti kegiatan kampanye. Hal senada disampaikan oleh Cecep, pengamat politik dari Universitas Indonesia, yaitu:

“Jadi, ketika SBY tidak maksimal dalam kampanye, masyarakat akhirnya berpikir untuk beralih ke pilihan lain.” (Budiarteti 2021)

Ketiadaan sosok elit atau figur kuat yang dapat menjadi pengganti figur SBY di partai Demokrat memperparah posisi partai Demokrat saat itu. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai putra SBY diproyeksikan untuk dapat menjadi penerus untuk menggantikan peran orang tuanya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam partai politik. AHY dinilai belum mampu meneruskan estafet kepemimpinan partai Demokrat setelah SBY memutuskan untuk pensiun. Hal tersebut dikarenakan figur SBY yang begitu kuat dan banyak masyarakat yang beranggapan bahwasannya belum waktunya AHY untuk dapat menjadi sekuat SBY.

Absennya figur Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kekuatan utama partai Demokrat, yang diharapkan mampu meningkatkan kembali perolehan suara partai Demokrat, menjadikan partai Demokrat kembali mengalami penurunan perolehan suara, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Oleh karena itu, perolehan suara partai Demokrat kembali mengalami penurunan dikarenakan kekuatan utama partai Demokrat tidak dapat hadir dalam kegiatan kampanye partai Demokrat. Ketidakhadiran figur SBY dalam kampanye partai Demokrat merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab menurunnya perolehan suara partai Demokrat di kota Semarang.

2. Ketiadaan Perwakilan Partai Demokrat Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Partai politik merupakan kendaraan yang digunakan oleh elit-elit politik sebagai kendaraan untuk memperoleh kekuasaan tertinggi di Indonesia. Bahkan, beberapa partai-partai politik di Indonesia digunakan oleh elit-elit partai politik sebagai kekuatan utama dari partai politik untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Hal tersebut lumrah terjadi, karena salah satu fungsi partai politik yaitu

untuk mengantarkan elit atau personalia untuk menduduki jabatan di pemerintahan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi partai yang paling banyak digunakan oleh elit partai, Megawati Soekarnoputri, sebagai pendiri partai dan ketua umum, sebagai kendaraan politik untuk menjadi presiden Republik Indonesia. Megawati Soekarnoputri dicalonkan sebagai calon presiden oleh PDIP pada 3 (tiga) pemilu berturut-turut yaitu pada tahun 1999, pemilu tahun 2004 dan pemilu tahun 2009.

Selain PDIP, partai-partai lain juga mengusung kekuatan utama yang dimiliki partai politik untuk menjadi presiden Republik Indonesia, seperti Partai Kebangkitan Bangsa pada pemilu tahun 1999 mengusung Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai calon presiden melalui Koalisi Partai Poros Tengah. Pada Pemilu 2004, Partai Amanat Nasional (PAN) mengusung Amien Rais sebagai calon presiden, namun kalah dalam perolehan suara.

Partai Demokrat juga melakukan hal serupa, dengan menjadikan kekuatan utama partai sebagai calon presiden Republik Indonesia pada tahun 2004 dan tahun 2009. Pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) oleh partai Demokrat dalam pemilihan presiden (pilpres) dinilai sukses. Hal itu terbukti dengan terpilihnya SBY sebagai presiden Republik Indonesia pada periode 2004-2009 dan pada periode 2009-2014.

Munculnya SBY sebagai kekuatan utama partai Demokrat untuk menduduki jabatan tertinggi di Indonesia sebagai presiden Republik Indonesia, dinilai mampu meningkatkan perolehan suara partai Demokrat. Pada pemilu tahun 2004, partai Demokrat yang saat itu masih berusia 3 tahun sejak dibentuk, mampu memperoleh 56 kursi di DPR dan menduduki posisi ke-5 serta menghantarkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden Republik Indonesia. Kinerja yang baik dan dirasakan oleh masyarakat pada pemerintahan SBY, mampu meningkatkan perolehan suara partai Demokrat. Hal tersebut dibuktikan pada pemilu 2009, partai Demokrat menjadi partai pemenang pemilu dan memperoleh 148 kursi di DPR serta menghantarkan Susilo Bambang Yudhoyono

kembali menjadi presiden Republik Indonesia periode kedua. Sebagaimana dikatakan oleh Badan Komunikasi dan Strategi Partai Demokrat Jawa Tengah, Wahyu KH :

“Pada tahun 2004 dan 2009 menjadi tahun emas bagi partai Demokrat, tidak hanya pak SBY yang menjadi pemenang, tapi kami, partai Demokrat juga merasakan kemenangan tersebut, kunci utama kesuksesan partai Demokrat pada tahun tersebut dikarenakan pak SBY nyalon presiden dan menang” (Wawancara, Wahyu, Ketua Bakomstra PD Jateng, 03 Maret 2023)

Peningkatan suara partai Demokrat pada tahun 2004 dan 2009 dikarenakan partai Demokrat mengirimkan kader utamanya untuk menjadi kandidat presiden, sehingga partai Demokrat semakin dikenal oleh masyarakat dan meningkatkan perolehan suara partai Demokrat baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Hal tersebut merupakan hal yang lumrah, apabila partai politik memiliki perwakilan kader atau kekuatan politik yang dimilikinya kedalam pemilihan presiden ataupun wakil presiden maka secara tidak langsung perolehan suara partai politik yang mengusung akan meningkat. Hal senada disampaikan oleh kader partai Demokrat sekaligus calon anggota legislatif pada pemilu 2019 kota Semarang

“Sebenarnya, partai Demokrat bisa menang dan memperoleh suara yang tinggi di tahun 2004 dan 2009 karena apa? ya, karena partai Demokrat memiliki keterwakilan dalam pilpres, begitu juga PDIP mendapatkan suara yang tinggi karena ada perwakilan mereka.” (Wawancara, Ivan, Kader PD Jateng, 03 Maret 2023)

Pada tahun 2004 dan 2009, selain partai Demokrat yang mengusung Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden Republik Indonesia, PDIP juga mengusung dan mencalonkan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden Indonesia. Pencalonan kader partai atau kekuatan utama partai politik dinilai mampu meningkatkan suara partai politik tersebut. Oleh karena itu, perolehan suara partai politik baik di tingkat nasional maupun daerah dipengaruhi oleh keterwakilan

kekuatan politik yang dimiliki dalam ajang pemilihan presiden dan wakil presiden.

Pemilu 2014 dan pemilu 2019 menjadi pembuktian bahwasannya perolehan suara dipengaruhi oleh keterwakilan elit partai politik sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh peningkatan perolehan suara dan menjadi partai pemenang pemilu dalam dua periode pemilu berturut-turut yaitu pemilu tahun 2014 dan pemilu tahun 2019. Hal itu dikarenakan PDIP mencalonkan elit partai yang merupakan salah satu kekuatan PDIP yaitu Joko Widodo sebagai calon presiden Republik Indonesia. Selain PDIP, partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) juga mencalonkan elit partai yang merupakan kekuatan utama partai Gerindra sebagai calon presiden Republik Indonesia. Partai Gerindra mengusung Prabowo Subianto yang merupakan pendiri partai Gerindra dan ketua dewan partai Gerindra menjadi calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2014 dan 2019. Dampaknya, partai Gerindra mendapatkan peningkatan suara partai dan berhasil memperoleh kursi kedua tertinggi setelah PDIP. Seperti yang disampaikan informan :

“PDIP dan Gerindra dalam dua pemilu ini suaranya meningkat gak? Pastilah, karena mereka ada perwakilan di pemilihan presiden, makannya suara mereka meningkat, partai Demokrat (dalam dua pemilu) tidak ada perwakilan sama sekali, makannya kita turun” (Wawancara, Adian, Anggota Bakomstra PD Jateng, 22 Februari 2023)

Pada pemilihan umum (pemilu) tahun 2014 dan tahun 2019, partai Demokrat tidak memiliki kekuatan baru untuk menggantikan peran Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kekuatan utama partai Demokrat. Partai Demokrat tidak dapat mencalonkan kembali SBY dikarenakan sudah menjadi presiden Republik Indonesia sebanyak dua kali atau dua periode. Oleh karena itu, partai Demokrat belum mampu menemukan pengganti SBY untuk diusung menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden, sehingga masyarakat yang awalnya mendukung partai Demokrat dikarenakan ketokohan SBY mengalihkan dukungannya

kepada partai Gerindra yang didukung oleh partai Demokrat dan memiliki keterwakilan dalam pemilihan presiden.

Dikarenakan ketiadahadiran kader kuat partai Demokrat dalam pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden, partai Demokrat mengalami penurunan perolehan suara baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh ketua DPD partai Demokrat Jawa Tengah, Ali Mas'adi sebagai informan.

“Ya mas, kurang lebih seperti itu, kalau saya bilang sih efek ekor jas, jadi siapa yang memiliki perwakilan capres atau cawapres maka suaranya naik, kalau tidak ada ya turun mas”
(Wawancara, Ali Mas'adi, Dewan Eksekutif PD Jateng, 03 Maret 2023)

Efek ekor jas atau coattail effect menurut Chester J. Pach yaitu hubungan positif antara kekuatan elektoral seorang calon presiden ataupun calon wakil presiden dengan partai politik yang mengusungnya (Kartikasari 2020). Dengan kata lain, apabila partai politik mengusung salah satu kader potensial yang dimiliki untuk mengikuti pemilihan presiden atau wakil presiden maka perolehan suara partai politik tersebut akan meningkat. Oleh karena itu, partai Demokrat pada pemilu 2019 memperoleh penurunan suara dikarenakan partai Demokrat tidak mengusung salah satu kader yang dimilikinya.

Oleh karena itu, penurunan suara partai Demokrat baik ditingkat nasional maupun di tingkat daerah seperti kota Semarang, dikarenakan pada pemilu 2019 partai Demokrat tidak memiliki kader yang dicalonkan oleh partai sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jadi, ketiadaan perwakilan kader atau elit partai politik sebagai kekuatan utama partai politik dalam pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan salah satu penyebab penurunan suara partai politik. Seperti yang dialami oleh partai Demokrat nasional maupun daerah pada pemilihan umum tahun 2019.

B. Ketidakterkaitan Koherensi Partai Demokrat Dalam Pemilu 2019

Umumnya, koherensi merupakan sebuah pola yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang solid dan utuh. Koherensi biasanya digunakan dalam penggunaan kalimat, dengan kata lain

koherensi mengandung makna pertalian antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Namun, Basedau dan Strohh menggunakan koherensi sebagai salah satu aspek dalam pelebagaan partai politik yang mereka cetuskan. Koherensi yang dimaksud oleh Basedau dan Strohh memiliki makna yang sama dengan defenisi tersebut, namun lebih mengarah kepada organisasi partai politik dimana kader partai politik harus bergerak bersama sebagai satu kesatuan berdasarkan visi misi yang dianut oleh partai politik tersebut.

Pada dasarnya, partai politik harus bergerak dan melakukan tindakan sebagai satu kesatuan organisasi, bukan perorangan atau kelompok di dalam partai politik tersebut. Koherensi dapat diterjemahkan bagaimana suatu partai politik mampu mentoleransi serta menengahi perselisihan yang terjadi dalam internal partai. Oleh karena itu, koherensi memiliki tujuan utama untuk menyamaratakan visi misi dan arah tujuan partai. Menurut Basedau dan Stroh, terdapat dua indikator kualitatif yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat koherensi yang dimiliki oleh partai politik. Pertama, prevelansi (jumlah anggota yang memberontak) penyeberangan dan/atau pemberontakan dari kelompok parlemen selama masa legislatif. Pemimpin-pemimpin partai dapat melakukan toleransi terhadap beberapa kader partai yang memberontak tanpa menggunakan kekerasan verbal, ancaman, atau upaya pengusiran. Hal tersebut dapat ditoleransi apabila pelanggaran yang dilakukan bukan merupakan pelanggaran besar yang bertolak belakang dengan anggaran dasar serta prinsip-prinsip partai. Kedua, sifat politik intrapartai didapat melalui evaluasi politik faksional oleh divisi atau badan-badan didalam internal partai. Keberagaman divisi atau badan dalam suatu partai tidak dapat dikatakan sebagai masalah, selama terjalin keharmonisan antar kelompok tersebut (Basedau and Stroh 2011).

Hubungan yang berkala harus diciptakan untuk meningkatkan keharmonisan dalam internal partai. Dalam mencapai keselaran dan kesatuan dalam pergerakan organisasi akan mudah dijalankan apabila memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang pentingnya keharmonisan dalam internal partai politik. Koherensi dilakukan untuk menciptakan partai politik yang stabil dan minim penyimpangan serta konflik di dalam internal partai. Terdapat 2 (dua) faktor penyebab koherensi partai Demokrat tidak berjalan yaitu tidak jelasnya posisi partai Demokrat dalam pemilu 2019 dan mesin partai Demokrat kota Semarang tidak berjalan baik.

1. Partai Demokrat Memiliki Posisi Yang Tidak Jelas Dalam Pemilu 2019

Partai Demokrat merupakan partai yang dibentuk pada tahun 2001 dan berusia sekitar 3 tahun setelah terbentuk menjadi salah satu partai peserta pemilu tahun 2004. Partai Demokrat yang kala itu masih tergolong muda, mengusung kekuatan utama mereka, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengikuti pemilihan presiden Republik Indonesia. Kinerja SBY pada dua kepemimpinan sebelumnya Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri sebagai menteri dinilai baik oleh masyarakat sehingga SBY mendirikan partai Demokrat sebagai kendaraan politiknya untuk menjadi presiden Republik Indonesia pada pemilu selanjutnya. Hasilnya pada pemilu 2004, SBY terpilih menjadi presiden Republik Indonesia dan membawa partai Demokrat memperoleh kursi tertinggi kelima di pemerintahan Republik Indonesia padahal partai Demokrat baru pertama kali mengikuti pemilu.

Kinerja yang baik dan kharismatik yang diperlihatkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden Republik Indonesia periode 2004-2009 dinilai memuaskan oleh masyarakat. Hasil dari kinerja yang baik tersebut, masyarakat dinilai sejahtera dengan kepemimpinan SBY pada tahun tersebut. Hal itu terbukti, pada pemilu selanjutnya, yaitu pemilu pada tahun 2009, Susilo Bambang Yudhoyono kembali mencalonkan diri sebagai presiden Republik Indonesia dan menang. Partai Demokrat yang sebelumnya hanya berada diperingkat kelima perolehan kursi tertinggi di pemerintahan, dalam pemilu 2009 mampu berada di urutan teratas sebagai partai dengan kader terbanyak yang menjabat sebagai perwakilan rakyat.

Kesuksesan partai Demokrat di tingkat nasional juga dirasakan ditingkat daerah, salah satunya kota Semarang. Hal itu terbukti pada pemilihan walikota dalam dua periode yaitu periode 2000-2005 dan periode 2005-2010 kader partai Demokrat yaitu Sukawi Sutarip menjadi orang nomor 1 di kota Semarang. Walaupun perolehan kursi DPRD kota Semarang masih didominasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, namun partai Demokrat juga memberikan dominasi dengan terpilihnya Sukawi Sutarip sebagai walikota kota Semarang.

Dominasi yang diperoleh partai Demokrat diusia yang masih muda, menjadikan partai Demokrat langsung merasakan keistimewaan sebagai partai pendukung pemerintahan atau koalisi. Pemerintahan koalisi merupakan susunan kabinet dalam pemerintahan parlementer, yang terdiri dari partai-partai pemenang pemilu dan beberapa partai yang memiliki tujuan yang sama sehingga partai-partai tersebut bekerja sama. Sebagaimana disampaikan oleh ketua Bakomstra Partai Demokrat Jateng:

“Kita, masih awal-awal berdiri sudah dipemerintahan, dua periode lagi, partai-partai yang dipemerintahan itu dapat privilege dibandingkan diluar pemerintahan” (Wawancara, Wahyu, Ketua Bakomstra PD Jateng, 03 Maret 2023)

Dominasi yang diperoleh partai Demokrat selama dua periode, menjadikan partai Demokrat sebagai partai penguasa dan mendapatkan privilege lebih dibandingkan partai-partai lainnya. Kesuksesan yang diperoleh partai Demokrat sebagai pemenang yaitu berada didalam koalisi atau pemerintahan sehingga, kebijakan-kebijakan yang dirasa sesuai dengan visi misi dan ideologi yang dimiliki partai Demokrat dapat terlealisasi dengan mudah. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintahan biasanya hanya ditentang oleh oposisi atau pihak-pihak dan partai politik yang berada diluar pemerintahan. Dengan kata lain, oposisi merupakan gabungan beberapa partai politik yang bukan pemenang pemilu dan tidak berada dalam pemerintahan.

Ketiadaan Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu 2014 sebagai calon presiden dikarenakan jatah presiden hanya 2 periode membuat perolehan suara partai Demokrat mengalami penurunan. Partai Demokrat yang pada awalnya berada pada posisi pertama sebagai partai dengan kader terbanyak dalam pemerintahan, mengalami penurunan suara yang mengakibatkan penurunan perolehan kursi dan menduduki posisi keempat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang saat itu mengantarkan Joko Widodo sebagai presiden Republik Indonesia mendudukin peringkat tertinggi perolehan kursi legislatif. Hasil dari pemilu 2014 tersebut, PDIP menjadi partai yang berkuasa bersama dengan koalisi-koalisi yang dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan. Partai Demokrat yang saat itu hanya berada diurutan keempat,

mendeklarasikan diri sebagai partai oposisi pada pemerintahan presiden Joko Widodo periode 2014-2019.

“Ya, pada saat itu kita mendeklarasikan diri sebagai partai oposisi di pemerintahan pak Jokowi, harus ada penyeimbang, bukan kita tidak support, tapi kita support dari sisi sebaliknya harus dari dua sisi” (Wawancara, Adian, Anggota Bakomstra PD Jateng, 22 Februari 2023)

Kebijakan dan pernyataan sikap partai Demokrat sebagai partai oposisi pada pemerintahan presiden Joko Widodo dianggap sebagai langkah yang baik, hal itu lantaran pada pemerintahan SBY dan partai Demokrat, PDIP juga bertindak sebagai oposisi. Oleh karena itu, pada pemerintahan Joko Widodo periode pertama mendeklarasikan diri sebagai partai oposisi dan berada diluar pemerintahan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang baru bagi partai Demokrat harus berada diluar pemerintahan sejak selama dua periode berada dalam pemerintahan, jadi masih banyak yang harus dibenahi.

“Baru pertama jadi oposisi, ya gitu, ibaratnya kita minoritas mereka mayoritas, kita menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat, dan menyampaikan kepada pemerintahan, untuk output nya ya kembali ke pemerintahan.” (Wawancara, Adian, Anggota Bakomstra PD Jateng, 22 Februari 2023)

Langkah yang diambil oleh partai Demokrat dalam menjadi oposisi pada pemilu 2014, disampaikan langsung oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu masih berstatus sebagai ketua umum partai Demokrat. Sehingga partai Demokrat semakin mantap untuk tidak bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo periode pertama dikarenakan arahan langsung dari ketua umum partai Demokrat yang saat ini menjabat sebagai Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Kembali terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden Republik Indonesia periode kedua pada tahun 2019 dan berhasilnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh suara tertinggi dalam pemilu 2019, menjadikan partai Demokrat kembali berada diluar pemerintahan. Hal itu dikarenakan partai Demokrat ingin melanjutkan

peran yang sebelumnya sudah dilaksanakan pada tahun 2014-2019 sebagai partai yang berada diluar pemerintahan.

Namun, pada pemerintahan presiden Joko Widodo periode kedua, terdapat perbedaan sikap yang terjadi di dalam batang tubuh partai Demokrat. Walaupun partai Demokrat tidak masuk kedalam pemerintahan, partai Demokrat juga mendeklarasikan diri sebagai partai yang netral dan tidak sebagai oposisi. Hal tersebut menjadikan partai Demokrat sebagai partai yang berada diantara pihak koalisi dan pihak oposisi. Selain itu, beberapa kader partai Demokrat tampak ikut dalam mendukung.

“Posisi partai Demokrat dalam pemilu 2019 itu tidak jelas, kita seperti dibilang didalam tidak dan diluar juga tidak, sebenarnya kita mendeklarasikan diri sebagai partai yang netral, namun sepertinya masyarakat tidak melihat demikian, mereka melihat partai Demokrat itu tidak jelas arah dan tujuannya, itu menjadi salah satu faktor kenapa kita kehilangan suara” (Wawancara, Adian, Anggota Bakomstra PD Jateng, 22 Februari 2023)

Posisi yang diambil oleh partai Demokrat yang tidak jelas, menjadikan masyarakat dan beberapa pendukung partai Demokrat mengalihkan dukungannya kepada partai politik lainnya. Terjadi ketidakharmonisan di dalam batang tubuh partai Demokrat yang terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu yang menyatakan sebagai oposisi dan kubu yang menyatakan diri sebagai netral. Hal tersebut menjadikan partai Demokrat belum mampu menerapkan prinsip koherensi dalam pelembagaan partai politik menurut Basedau dan Strooh. Oleh karena itu, ketidakserasian koherensi di dalam batang tubuh partai Demokrat antar kader menjadikan masyarakat mengalihkan dukungan yang awalnya diberikan kepada partai Demokrat, dan mengakibatkan perolehan suara partai Demokrat mengalami penurunan.

2. Mesin Partai Demokrat Tidak Bekerja Dalam Pemilu 2019 Kota Semarang

Eksistensi partai politik merupakan sebuah keniscayaan guna meraih demokrasi di Indonesia yang berkonsolidasi. Partai politik harus mampu menampung aspirasi-asppirasi dan kepentingan masyarakat. Pada

awal kemunculannya, partai politik hanya sebagai artikulatif yaitu penghubung antara rakyat dengan pemangku kebijakan. Namun, dalam perkembangannya, partai politik lebih fleksibel dan dianggap sebagai media yang cukup representif dalam menemukan kebijakan publik.

Partai politik dalam realitasnya melenceng jauh dari harapan, tidak sesuai dengan substansi dan normatif dalam teori. Praktik partai politik telah terjadi penyimpangan dan penipuan terhadap publik oleh elit partai politik yang kurang menguasai mesin politik tersebut. Partai politik hanya dijadikan sebagai “kendaraan” untuk memperoleh kekuasaan, dan menjadi pertarungan egoisitas antar individu untuk memperoleh kekuasaan. Hal itu menjadikan partai politik mendapatkan stigma yang buruk dari masyarakat.

Pada awal terbentuknya, partai Demokrat diperuntukan sebagai kendaraan politik untuk mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi presiden Republik Indonesia. Meskipun demikian, Susilo Bambang Yudhoyono berhasil mencapai tujuan yang ingin dicapainya yaitu menjadi orang nomor 1 di Republik Indonesia. Kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono juga meningkatkan perolehan partai Demokrat meskipun partai tersebut merupakan partai yang baru terbentuk. Dengan kata lain, masyarakat yang kala itu memilih partai Demokrat dikarenakan adanya Susilo Bambang Yudhoyono. Oleh karena itu, partai Demokrat tidak memiliki basis massa tradisional atau pendukung loyal yang siap digerakkan untuk membantu calon pilihannya yang berasal dari partai Demokrat menang.

“Partai Demokrat itu tidak punya basis massa yang loyal, tidak seperti PDI, namun sebenarnya itu bukan masalah tapi kalau mesin parpolnya benar-benar bisa bekerja” (Wawancara, Adian, Anggota Bakomstra PD Jateng, 22 Februari 2023)

Dalam dunia perpolitikan demokrasi perwakilan, mesin politik merupakan organisasi partai yang merekrut anggotanya dengan menggunakan insentif yang nyata dan ditandai dengan tingkat kontrol kepemimpinan yang tinggi terhadap anggota-anggotanya. Dasar dari kekuatan mesin partai politik yaitu kemampuan pemimpin atau kelompok untuk memaksimalkan suara calon dari partai mereka.

Mesin partai politik dapat bekerja dengan baik, apabila seorang pemimpin partai mampu mendongkrak suara partai politik yang dipimpinnya. Apabila mesin partai bergerak dengan baik, maka perolehan suara partai politik dapat meningkatkan perolehan suara. Sebagaimana yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilu sebelum-sebelumnya. Walaupun hal itu berhasil, namun menjadi blunder bagi partai Demorkat, terkhusus partai Demokrat kota Semarang dimana pemimpin partai Demokrat kota Semarang yang seharusnya berusaha untuk memaksimalkan perolehan suara partai malah ikut kedalam pemilihan sebagai calon legislatif.

Pada pemilu 2019, pemimpin partai Demokrat Jawa Tengah, Wahyoe Winarto, mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPRD kota Semarang dapil VI, dan berhasil menjadi anggota DPRD kota Semarang. Memang di dalam AD/ART partai Demokrat tidak ada larangan ketua partai Demokrat tingkat daerah untuk menjadi calon legislatif, namun hal tersebut akan berdampak terhadap mesin partai Demokrat kota Semarang itu sendiri. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Adian yang merupakan anggota Bakomstra Partai Demokrat Jawa Tengah :

“Memang tidak ada aturannya, cuman jadinya tidak etis, kan dia diberi amanat untuk memimpin partai Demokrat di daerah, tapi malah maju” (Wawancara, Adian, Anggota Bakomstra PD Jateng, 22 Februari 2023).

Hal senada juga disampaikan oleh Dewan Eksekutif partai Demokrat Jawa Tengah, Ali Mas’adi :

“Kita milih pemimpin biar bisa membawa partai Demokrat kearah yang lebih baik, tapi kalau jadi caleg takutnya fokusnya terbagi” (Wawancara, Ali Mas’adi, Dewan Eksekutif partai Demokrat Jawa Tengah).

Selain keterlibatan pemimpin partai Demokrat daerah dalam pemilihan legislatif daerah yang menyebabkan mesin partai Demokrat tidak maksimal, terdapat rekrutmen partai Demokrat kota Semarang yang kurang maksimal sehingga menyebabkan mesin partai Demokrat kota Semarang tidak maksimal. Hal tersebut disampaikan oleh kader partai Demokrat, Susyanto

“Selain itu, coba di cek mas, massa partai Demokrat kota itu tidak sebanyak dulu, banyak yang beralih ke PDI, sampai-sampai kota Semarang dan Jawa Tengah di klaim sebagai daerah pemenangan PDI, kemana massa yang dulu mendukung partai Demokrat beralih mendukung PDI, jangan-jangan ada yang tidak berjalan dalam rekrutmen politiknya” (Wawancara, Kader partai Demokrat, Susyanto, 15 Maret 2023).

Rekrutmen merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh masing-masing partai politik. Rekrutmen politik memiliki tujuan agar masyarakat secara luas memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai dunia perpolitikan, terutama politik Indonesia. Selain itu, rekrutmen juga menjadi upaya partai politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik.

Partai Demokrat merupakan partai politik yang tidak memiliki basis massa atau pendukung yang solid. Masyarakat yang mendukung partai Demokrat dinilai hanya karena pengaruh elit partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Ketidadaan SBY mengakibatkan beberapa pendukung partai Demokrat mulai beralih dan mendukung partai-partai lain. Oleh karena itu, menjadi tugas partai Demokrat daerah untuk mengembalikan dan meraih kembali dukungan masyarakat dengan melakukan rekrutmen. Namun, dalam pemilu 2019 lalu, partai Demokrat hanya memiliki 2.093 yang memiliki Kartu Tanda Anggota partai Demokrat. Berbanding terbalik dengan pemilu 2014, yang kala itu memiliki 3.977 anggota. Penurunan anggota partai Demokrat dikarenakan pola rekrutmen partai Demokrat yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, tidak berjalan maksimalnya mesin partai Demokrat kota Semarang berdampak terhadap penurunan perolehan suara partai Demokrat kota Semarang.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Basedau dan Strooh, bahwa menurut mereka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelebagaan partai politik yaitu faktor internal kekuatan organisasi dan koherensi, serta faktor eksternal mengakar dalam masyarakat dan otonomi. Berdasarkan teori tersebut, apabila partai politik mampu melaksanakan faktor-faktor internal dan eksternal maka dapat dikatakan partai politik

tersebut sudah terlembaga dengan baik. Namun, apabila tidak terlaksana maka pelebagaan politik dalam suatu partai politik belum terlaksana.

Partai Demokrat mengalami penurunan perolehan suara pada pemilu tahun 2019 di kota Semarang dikarenakan partai Demokrat belum mampu melaksanakan pelebagaan partai politik sesuai dengan pendapat Basedau dan Strooh. Dalam internal partai Demokrat terdapat beberapa faktor yang dianggap sebagai tidak berjalannya faktor internal pelebagaan politik, seperti perpindahan kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono ke Agus Harimurti Yudhoyono dan ketiadaan perwakilan partai Demokrat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden serta faktor koherensi dimana terjadi ketidakserasian dalam partai Demokrat pada pemilu 2019 dan tidak optimalnya mesin partai Demokrat.

BAB VI

PENUTUP

Kajian mendalam terkait kesimpulan dari pemaparan hasil penelitian yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian, pada bab ini juga akan disajikan saran yang diajukan untuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil laporan penelitian dan saran dalam penelitian ini, diharapkan dapat mempermudah pembaca untuk mengetahui dan memahami inti pembahasana dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian yang dilakukan tentang penyebab penurunan perolehan suara partai Demokrat pada pemilu legislatif 2019 kota Semarang dan bagaimana faktor pelebagaan partai politik mempengaruhi penurunan perolehan suara partai Demokrat pada pemilu legislatif 2019 kota Semarang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penurunan suara partai Demokrat kota Semarang pada pemilu legislatif 2019 dipahami sebagai krisis legitimasi, krisis legitimasi terjadi dalam bentuk peralihan pemberian suara yang disebabkan oleh hilangnya kepercayaan pemilih sehingga beralih memberikan legitimasi kepada partai politik lain. Penurunan suara partai Demokrat dikarenakan menurunnya legitimasi terhadap tokoh-tokoh dalam partai Demokrat, yang diakibatkan karena partai Demokrat seperti kehilangan sosok Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan alasan utama masyarakat memilih partai Demokrat. Selain itu disebabkan karena menurunnya legitimasi terhadap tokoh-tokoh dalam partai Demokrat, yang diakibatkan beberapa kader partai Demokrat terlibat dalam tindak pidana korupsi kasus Hambalang sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan kepada partai Demokrat. Kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap partai Demokrat disebut sebagai krisis kepercayaan sehingga perolehan suara partai Demokrat beralih ke partai lain dan menyebabkan penurunan perolehan suara partai Demkokrat.
2. Pelebagaan partai politik merupakan salah satu tujuan dari dibentuknya partai politik itu sendiri. Dalam membangun pelebagaan politik, partai politik harus memenuhi 2 (dua) faktor dan 4 (empat) unsur, yaitu faktor internal dengan unsur kekuatan organisasi dan koherensi, serta faktor eksternal dengan unsur mengakar dalam masyarakat dan otonomi. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa partai

Demokrat mengalami beberapa kendala dalam melaksanakan pelembagaan partai politik sehingga menyebabkan penurunan perolehan suara partai Demokrat. Partai Demokrat mengalami kendala dalam faktor internal yaitu kekuatan organisasi dan koherensi partai. Dalam kekuatan organisasi partai Demokrat terjadi dua faktor penyebab terjadinya kendala dalam unsur kekuatan organisasi tersebut yaitu terjadinya perpindahan kekuasaan dari Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan kekuatan utama dari partai Demokrat ke Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan anak dari Susilo Bambang Yudhoyono dan ketiadaan perwakilan kader partai Demokrat dalam pemilihan presiden atau wakil presiden dalam pemilu 2019. Selanjutnya, berdasarkan unsur koherensi dalam partai Demokrat terjadi karena ketidakserasian koherensi partai Demokrat dalam pemilu 2019. Ketidakserasian itu disebabkan oleh ketidakjelasan posisi yang diambil partai Demokrat sehingga membuat masyarakat bingung untuk memberikan suara kepada partai Demokrat. Kedua unsur dalam faktor internal partai Demokrat menjadi penyebab penurunan perolehan suara partai Demokrat kota Semarang pada pemilihan legislatif tahun 2019.

3. Faktor-faktor yang telah dianalisis dan dijelaskan sebelumnya merupakan faktor yang menjadi penyebab penurunan suara partai Demokrat. Faktor-faktor yang dijelaskan tersebut merupakan faktor-faktor penurunan suara yang terjadi pada partai Demokrat secara umum, namun berdampak pada juga terhadap penurunan suara partai Demokrat di tingkat daerah. Dalam hal itu disebut sebagai efek ekor jas atau *coattail effect* yaitu dampak-dampak yang terjadi di daerah merupakan akibat dari dampak yang terjadi di tingkat pusat atau nasional.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dipaparkan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai dasar bagi beberapa pihak yang ingin menggunakan hasil penelitian ini, diantaranya :

1. Terjadinya penurunan perolehan suara partai Demokrat kota Semarang pada pemilu legislatif tahun 2019 disebabkan oleh krisis legitimasi yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti memiliki saran kepada pengurus aktif partai Demokrat dapat memperbaiki legitimasi partai Demokrat dengan cara lebih meningkatkan kualitas kader partai Demokrat sebagai salah satu upaya strategis guna meningkatkan perolehan suara partai Demokrat dalam pemilihan legislatif kedepannya.

2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan setiap partai politik dalam memberikan perhatian lebih mengenai persoalan pelebagaan partai. Hal itu dikarenakan pelembagaan partai memiliki peran yang krusial dan memiliki dampak terhadap perolehan suara dalam pemilihan legislatif.
3. Penulis menyadari bahwa hasil dari penulisan skripsi ini bukanlah hasil yang mutlak, hal itu dikarenakan penelitian di bidang sosial memiliki sifat yang dinamis dan dapat berubah sesuai kondisi ruang dan waktu. Oleh karena itu, penulis ingin memberikan saran dan masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya guna memperluas cakupan wilayah penelitian dikarenakan cakupan penelitian ini sangat terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, Ahmad. 2016. "Refleksi Teori Kritis Jurgen Habermas Atas Konsesus Simbolik Perda Syariah." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16(1): 71–88.
- Adnan, M. Fachri. 2002. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilihan Umum." *Jurnal Demokrasi* 1(1).
- Azhari, and Inu Kencana Syafii. 2008. *Sistem Politik Indonesia*. xii. ed. Aep Gunarsa. Bandung: Refika Aditama.
- Basedau, Matthias, and Alexander Stroh. 2011. "Measuring Party Institutionalization in Developing Countries: A New Research Instrument Applied to 28 African Political Parties." *SSRN Electronic Journal* (February).
- Budi P., Dita Setya, and Luthfi Muta'ali. 2015. "Kajian Geografi Politik Terhadap Perubahan Perolehan Suara Partai Demokrat Pada Pemilu 2009 Dan 2014 Kabupaten Pacitan." *Jurnal Bumi Indonesia* 4(2).
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarteti, Afni Ria. 2021. "Kekuatan Figur Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Partai Demokrat Di Kabupaten Pacitan." *E-CIVICS* X(3): 260–70.
- Budiatri, Aisah Putri et al. 2018. *Personalita Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor.
- Creswell, John. 2017. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Newbury Park: Sage.
- Dhakidae, Daniel. 2003. *Cendekiawan Dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*. eds. Frans Parera, Yakob Koekeritz, and Dwi Helly P. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Di, Kepartaian et al. 2016. "Penyederhanaan Partai Politik Dalam Sistem Kepartaian Di Indonesia Sejak Perubahan Undang-Undang 1945." *Diponegoro Law Review* 5(2): 1–12.
- Efriza. 2012. *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta.
- Faizal, Akbar. 2005. *Partai Demokrat & SBY: Mencari Jawab Sebuah Masa Depan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gunanto, Djoni. 2020. "Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia." *Sawala : Jurnal Administrasi Negara* 8(2): 258–68.
- Gustiawan, Dwiki, and Anwar. 2022. "Perkembangan Komunisme Di Indonesia Tahun 1914-1927." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO (JPPS-*

- UHO* 7(1): 57–72. <http://jpps.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/24/7>.
- Habermas, Jurgen. 2004. *Krisis Legitimasi*. Qalam. Yogyakarta.
- Hardiman, Budi. 1993. *Menuju Masyarakat Komunikatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Herdiansyah, Haris. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. xvi. Jakarta: Salemba Humanika.
- Iqbal, M. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Ghalia Ind. Jakarta.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2020. *Pengantar Hukum Partai Politik*. Prenadamedia Group.
- Karim, M.Rusli. 1983. *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartikasari, Fithri. 2020. “Kontestasi Gerindra Dan PKS Dalam Memanfaatkan Coattail Effect Pada Pemilu Serentak 2019 Di Kota Padang.” *scholar.unand.ac.id*.
- Labolo, Muhadam, and Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Kencana Prenada Media Group.
- Mulyana, Mah, and Effendi Hasan. 2020. “Pengaruh Legitimasi Masyarakat Terhadap Pemungutan Suara Ulang Pada Pilkada 2017 Di Kabupaten Gayo Lues.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 5(1).
- Munthe, Atom Ginting. 2002. “Perjalanan Demokrasi Di Indonesia.”
- Puteri, Sitaresmi N.R.P. 2014. “Penurunan Suara PKB Dalam Pemilu Legislatif 2009 Di Kabupaten Jombang Dan Upaya-Upaya Mengaasnya.” 3(3): 434–45.
- Rahayu, Siti. 2020. *PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN PRESIDEN Analisis Kekalahan Koalisi Indonesia Kerja Dalam Pemilihan Presiden 2019 Di Kabupaten Tangerang*.
- Romli, Lili. 2016. “Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia.” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 2(2): 199–220.
- S, Aminah, and Roikan. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Salim, Salim, and Syahrumsyah Syahrumsyah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. ed. Haidir. Bandung: Ciptapustaka Media.

- Saliman, Farhan. 2015. "Faktor-Faktor Di Balik Kekalahan Cagub/Cawagub Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pada Pilgub DKI Jakarta Tahun 2012." *repository uinjkt*.
- Saputra, Arizal, and Ubaidullah. 2021. "Analisis Kegagalan Marketing Politik Partai NasDem Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip* 6(2).
- Setiawan, Wawan. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung Dalam Pengawasan Praktik Money Politic Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)." *UIN Raden Intan Lampung*.
- Siahaan, Sri .Dewi .Monalisa. 2022. repository unja "Penurunan Perolehan Suara Partai Demokrat Dalam Pemilu 2019 Di Provinsi Jambi." Universitas Jambi.
- Sigit, Pamungkas. 2011. *Partai Politik Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Soim, Musa. 2018. "Analisis Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Tentang Partai Politik Islam Di Indonesia." *eprint.walisongo.ac.id* (132211050).
- Svasand, Lars., and Vicky Randall. 2002. "Party Institutinalizations In New Democracies." *Sage Publications* 8(1).
- Syafrianti, Elia. 2018. "Legitimasi Partai-Partai Politik Di Kota Padang : Studi Penurunan Perlohan Suara Pada Pemilihan Legislatif Dari PKS, PAN, Dan Demokrat Pada Tahun 2004, 2009, 2014 Di Kecamatan Padang Barat." Universitas Andalas.
- Syafridho, Syawal Ayuza. 2022. "Analisis Penurunan Suara Partai Hanura Pada Pemilu Legislatif Kota Padang Tahun 2019 Dalam Perspektif Pelembagaan Partai Politik." *scholar.unand.ac.id*.
- Tryatmoko, M W. 2016. "Strategi Kontemporer Partai-Partai Politik Di Indonesia 2004-2009." *Jurnal Penelitian Politik* (April 2004). <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/383>.
- Ukhra, Aunil. 2022. "Isu Politik Identitas Dan Dinasti Politik Dalam Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020." *eprint.umm.ac.id*.
- Yuwanda, Yusril, and Iqbal Ahmady. 2022. "Analisis Penurunan Perolehan Suara Anggota DPD RI Dapil Aceh Pada Pemilu 2019 (Studi Kasus Penurunan Perolehan Suara Fachrul Razi)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip USK* 7(1).
- Yuwita, Heni. 2018. "Penurunan Jumlah Suara Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilihan Umum Legislatif DPRD Di Kota Bekasi Tahun 2014."

LAMPIRAN

Picture 4 Permohonan Ijin Penelitian DPD PD Jawa Tengah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl Jalan Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 1992/Un.10.6/K/KM.05.01/09/2022 Semarang, 07 September 2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
DPD PARTAI DEMOKRAT JAWA TENGAH
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Pendidikan Politik (Studi Pendidikan Politik Partai Demokrat Jawa Tengah)" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Farishi Adityasandi
NIM : 1906016048
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Pekanbaru, 28 Januari 2001
CP/e-mail : 085664474700, farishiadityasnd@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Salamuddin, ST
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Uka Perum Garuda Permai I blok M no 07, kel. Air Putih, kec. Buah Madani Kota Pekanbaru, Riau 28296

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan
Kasubag Akademik

Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

Picture 5 Permohonan Ijin Penelitian DPC PD Semarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 598/Un.10.6/K/KM.05.01/03/2023 02 Maret 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
DPC PARTAI DEMOKRAT KOTA SEMARANG
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Analisis Penurunan Perolehan Suara Partai Politik : Studi Atas Partai Demokrat Dalam Pemilihan Legislatif DPRD Kota Semarang Tahun 2019**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Farishi Adityasandi
NIM : 1906016048
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Pekanbaru, 28 Januari 2001
CP/e-mail : farishiadityasnd@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Salamuddin, ST
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. UKA perumahan Garuda Permai blok M no 7

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


A. Gunawan, S.Ag, M.H.

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

Picture 6 Dokumentasi Wawancara Bapak Wahyoe Winarto Ketua DPC PD Semarang



Picture 7 Dokumentasi Wawancara Bapak Yunan DE Cabang PD Semarang



Picture 8 Dokumentasi Wawancara Bapak Ali Mas'adi DE Daerah PD Jawa Tengah



Picture 9 Dokumentasi Wawancara Bapak Wahyu KH Ketua Bakomstra PD Jateng



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Farishi Adityasandi
Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru, 28 Januari 2001
Alamat : Jl. Uka perum Garuda Permai I Blok M no 7, RT03/RW05, Kel. Air Putih, Kec Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau
NIM : 1906016048
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Agama : Islam
Email : farishiadityasnd@gmail.com
No. HP : 0856-6447-4700

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri 164 Pekanbaru 2007 – 2013
SMP Negeri 23 Pekanbaru 2013 – 2016
SMA Negeri 12 Pekanbaru 2016 – 2019

RIWAYAT ORGANISASI

Ketua Umum Fisip Sport Club 2022 – 2023
Ketua Divisi Sepakbola Walisongo Sport Club 2022 – 2023
Anggota Fisip Sport Club 2019 – 2023
Anggota Walisong Sport Club 2019 – 2023